

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DESA PESISIR BERBASIS *BLUE ECONOMY* DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

(Studi Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)



Disusun Oleh :

**FAIZA HUMAIRAH
NIM. 200602017**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Faiza Humairah

NIM : 200602017

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Yang Menyatakan



Faiza Humairah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Potensi Desa Pesisir Berbasis *Blue Economy* Dalam
Mewujudkan *Sustainable Development Goals*
(Studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Faiza Humairah
NIM: 200602017

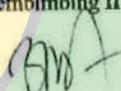
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 12 Desember 2023

Pembimbing I


Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II


Winny Dian Safitri, M.Si
NIP. 199112102019032018

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Potensi Desa Pesisir Berbasis *Blue Economy* Dalam
Mewujudkan *Sustainable Development Goals*
(Studi Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

Faiza Humairah
NIM: 200602017

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Desember 2023 M
08 Jumadil Akhir 1445 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Sekretaris


Winny Dian Saffri, M.Si
NIP. 199112102019032018

Penguji I


Ayumiati, S.E., M.Si. CTT
NIP. 197806152009122002

Penguji II


Dara Amanatillah, M.Sc. Fin
NIDN. 2022028705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,




Prof. Dr. Jafis Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Faiza Humairah
NIM : 200602017
Fakultas/Program Studi : FEBI/Ekonomi Syariah
E-mail : 200602017@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

“Analisis Potensi Desa Pesisir Berbasis *Blue Economy* Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Studi Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Desember 2023

Penulis
Mengetahui
Pembimbing I
Pembimbing II


Faiza Humairah
NIM. 200602017


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007


Winky Dian Safitri, M.Si
NIP.199112102019032018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S Al-Baqarah: 286)

Trust to Allah for everything no matter what. You lose you trust Allah, you win you trust Allah, you gain you trust Allah, you have a problem you trust Allah, things are not going your way, you thank him even more and you talk to him, a very good habit to talk Allah.

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, sholawat beriringan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT dan berkat sholawat atas Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dan dengan ini pula bisa mempersembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Fakri dan Ibunda Nilawati sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, karna telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya dapat di balas dengan selembar kertas yang bertuliskan cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia, karna sadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Juga kepada teman-teman seperjuangan yang turut membantu langsung maupun tidak langsung yang turut serta mendoakan. Terima kasih yang tak terhingga untuk semuanya. Semoga kita bisa bersama-sama nantinya di tempat terbaik dalam posisi yang terbaik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Skripsi dengan judul “**Analisis Potensi Desa Pesisir Berbasis *Blue Economy* Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**” ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penyusunannya. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah dengan izin Allah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan beribu terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus pembimbing I dan Ayumiati, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Hafiih Maulana, SP., S. HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Winny Dian Safitri, S.Si.,M.Si selaku pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan, meluangkan waktu, serta memberikan masukan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku Penasehat Akademik (PA) peneliti selama menempuh pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta perhatiannya kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu tercinta, Fakri, S.Pd. SD dan Nilawati yang sangat berjasa dalam hidup peneliti. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga peneliti merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh peneliti, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah peneliti dititik ini. Semoga Allah memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi peneliti.
8. Kepada kedua kakak kandung saya tercinta Vina Zurlina dan Munawwarah yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, cinta, do'a, serta motivasi yang tiada henti-hentinya agar peneliti dapat memperoleh yang terbaik dan tidak dapat ternilai bahkan terbalaskan.
9. Kepada sahabat-sahabat saya tercinta Nurul Azizah Br Tarigan, Isra Wulya Putri, Susi Afriani, Rahmayati Khaliza, Annisa Humaira, Alfia Azzuhra, Mulia Sarina, serta teman teman dari prodi Ekonomi Syariah leting 2020 dan juga beberapa teman lainnya yang telah memberi *support* saya dalam banyak hal mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang peneliti miliki. Peneliti

berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf atas segala kesalahan yang peneliti perbuat baik di sengaja maupun tidak sengaja. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan guna untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Peneliti

Faiza Humairah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. A R - R A N I R Y
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Faiza Humairah
NIM : 200602017
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Potensi Desa Pesisir Berbasis *Blue Economy* Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari., Lc., M.Ag
Pembimbing II : Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Potensi desa pesisir Indonesia sangat besar, terutama potensi sumber daya laut. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mewujudkan tujuan *Life Below Water* dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Gampong Lampulo dalam mewujudkan tujuan SDGs *Life Below Water* yang berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem laut, serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam upaya mengelola potensi tersebut menggunakan konsep *blue economy*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian yang digunakan sebanyak sepuluh orang, diantaranya ada satu panglima laot dan sembilan orang nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gampong Lampulo memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Potensi tersebut dapat memberikan sumber penghasilan yang stabil bagi warga desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, pengelolaan potensi tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keadaan alam yang tidak menentu dan harga BBM yang mahal.

Kata Kunci : Potensi, *Blue Economy*, SDGs, Perikanan

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	13
2.1.1 <i>SDGs Life Below Water</i>	17
2.1.2 Konsep SDGs dalam Ekonomi Islam	20
2.2 <i>Blue Economy</i>	24
2.3 Potensi Desa	34
2.4 Penelitian Terdahulu.....	40
2.5 Kerangka Pemikiran.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	50

3.3	Subjek dan Objek	50
3.4	Operasional Variabel	51
3.5	Teknik Pengumpulan Data	52
3.6	Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		55
4.1	Gambaran Lokasi Penelitian	55
4.1.1	Kondisi Geografis Gampong Lampulo.....	55
4.1.2	Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian.....	57
4.2	Deskripsi Informan Penelitian.....	60
4.3	Potensi Desa Pesisir dalam mewujudkan Tujuan SDGs <i>Life Below Water</i>	62
4.3.1	Potensi Perikanan Gampong Lampulo	62
4.3.2	Potensi Industri Gampong Lampulo	66
4.4	Kendala dalam Mengelola Potensi Desa Pesisir Menggunakan Konsep <i>Blue Economy</i> Untuk Mewujudkan Tujuan SDGs <i>Life Below Water</i>	69
4.5	Upaya dan Solusi Pemerintah dalam Mendukung Keberhasilan Penerapan Konsep <i>Blue Economy</i> Untuk Mewujudkan Tujuan SDGs <i>Life Below Water</i>	72
BAB V PENUTUP		79
5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		82

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	45
Tabel 3.1 Kategori Infroman	51
Tabel 3.2 Panduan Wawancara	51
Tabel 4.1 Penduduk Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin	58
Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	59



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 <i>Sustainable Development Goals</i>	3
Gambar 2.1 Siklus <i>Blue Economy</i>	30
Gambar 4.1 Peta Gampong.....	56
Gambar 4.2 Informan Berdasarkan Tingkat Pengalaman Melaut .	61
Gambar 4.3 Jumlah Produksi Ikan Lampulo	63
Gambar 4.4 Produk Industri Rumahan Lampulo.....	67
Gambar 4.5 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008.....	73
Gambar 4.6 Lembaga Yang Mengatur Adat Melaut	74
Gambar 4.7 Pemusnahan Alat Tangkap	76
Gambar 4.8 Kebijakan Subsidi BBM Untuk Nelayan.....	78



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Panduan Wawancara	87
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	88
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	89
Lampiran 4 Riwayat Hidup	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia yang berada pada posisi sangat strategis antara benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Dua pertiga dari wilayah Indonesia terdiri atas lautan dan kaya akan sumberdaya alam laut, dan terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Adapun garis pantai sepanjang 95.181 km² yang merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu 99.093 km² (Junef, 2019).

Melalui deklarasi Juanda, 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan pada dunia bahwa laut Indonesia (laut sekitar, diantara dan didalam Kepulauan Indonesia) menjadi satu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia sebagai negara kepulauan juga telah diakui dunia Internasional melalui sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-3 yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas memiliki sumber daya alam yang besar dan letak geografisnya yang cukup strategis, yang mana sebagai negara maritim harusnya Indonesia mampu

memanfaatkan semua unsur kelautan disekelilingnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa (Daulay, 2022).

Pada tanggal 25 September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan konsep pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. SDGs sendiri terdiri atas 17 tujuan global dengan 169 target yang dijadikan sebagai tuntutan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan di harapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

Tujuan dan target tersebut meliputi 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Ditinjau dari segi perspektif Islam SDGs sendiri dapat diimplementasikan dari trilogi hubungan manusia, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Islam tidak hanya mengedepankan tiga hubungan sebagai perwujudan kekuatan spiritual, tetapi juga menyediakan mekanisme hubungan timbal balik bagi pembangunan manusia dan pengembangan sistem di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan pemerintahan (Firdaus, 2022).

SDGs ini bergerak untuk proses pembangunan yang berkelanjutan, yang mana dalam tujuan pembangunannya ada 17 macam tujuan lain yang masing-masing memiliki fokus untuk pengembangan kualitas menjadi lebih baik dalam segala bidang.

Gambar 1.1
Sustainable Development Goals




Sumber : *SDGs Indonesia* (2016)

Pemerintah Indonesia memprioritaskan pengupayaan SDGs untuk membantu pembangunan nasional agar merata sampai ke pelosok negeri. Dilihat dari tujuan ke-14 yaitu *Life Below Water* (Ekosistem Kelautan), yang mana fokus tujuan *Life Below Water* tersebut mencakup kebijakan pemerintah tentang peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, serta tata kelola perikanan dan revitalisasi praktek perikanan berkelanjutan. Adapun target-target yang telah ditentukan dalam bidang kelautan Indonesia yakni tata ruang laut dan pengelolaan terhadap wilayah laut itu sendiri, pembatasan penangkapan ikan yang aman, pemberantasan IUU *Fishing*, peningkatan kawasan konservasi perairan, selanjutnya akan ada dukungan dari pemerintah terhadap nelayan kecil di wilayah pesisir pantai.

Target-target tersebut dapat dicapai melalui penggunaan konsep *blue economy*, konsep ini menggantikan praktek ekonomi lama yang hanya menghasilkan keuntungan sementara namun memiliki dampak negatif berkepanjangan bagi lingkungan.

Sedangkan konsep dari *blue economy* ini tidak hanya terpaku pada kegiatan ekonomi yang hanya mengandalkan basis eksploitasi sumber daya laut, melainkan dapat menghasilkan arus pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menjamin kelestarian sumber daya dan lingkungan yang seimbang dengan penggunaannya yang optimal. Maka dari itu penggunaan konsep *blue economy* ini sejalan dengan tujuan *Life Below Water* dari SDGs, yang mana tidak hanya praktek ekonomi lama yang digantikan namun penggunaan konsep *blue economy* dalam tujuan *Life Below Water* SDGs juga menjadi hal yang krusial demi menjaga kelestarian sumber daya dan lingkungan yang efektif dan efisien.

Dalam konsep *blue economy* terdapat siklus kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Siklus ini dimulai dari eksplorasi sumber daya laut, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya tersebut, hingga akhirnya menghasilkan produk atau jasa yang dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Siklus tersebut menciptakan interaksi yang kompleks antara semua pemangku kepentingan ini untuk mencapai tujuan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya laut. Kolaborasi di antara mereka adalah kunci keberhasilan dalam membangun *blue economy* yang seimbang dan berkelanjutan. Maka dari itu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia akan sangat diuntungkan oleh *blue Economy* dengan pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi dan mata pencaharian yang berkelanjutan dengan

mempertahankan ekosistem laut yang sehat. Pengalihan sasaran pembangunan ke wilayah pesisir dan laut merupakan salah satu alternatif pembangunan yang selama ini hanya bertumpu pada sektor pertanian dengan tingkat kejenuhan yang sudah semakin tinggi. Hal tersebut tetap untuk memadukan tiga kepentingan pembangunan yaitu, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kualitas sumber daya dan lingkungan. Upaya memadukan ketiga kepentingan tersebut dapat ditempuh melalui penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konsep *blue economy* (Daulay, 2022).

Konsep *Blue Economy* relevan untuk diterapkan di Provinsi Aceh dikarenakan Aceh merupakan miniatur dari wilayah Indonesia secara keseluruhan, luas wilayah daratan Aceh mencapai 57.365,57 km² atau 5.736.557 ha. Provinsi Aceh memiliki potensi ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang sangat besar meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya (laut, payau dan air tawar), pengolahan hasil perikanan dan juga pariwisata bahari. Pembangunan perikanan dan kelautan ke depan selain diharapkan dapat mengisi permasalahan yang ada di sektor perikanan dan kelautan juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah/ nasional yang antara lain meliputi peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidayaan ikan serta masyarakat pesisir lainnya, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha dan memperkuat ketahanan pangan nasional serta penerimaan devisa negara melalui pemanfaatan sumber daya

perikanan dan kelautan. Kerena itu, sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor unggulan yang akan memberikan kontribusi besar pada pembangunan Provinsi Aceh apabila pemanfaatannya dilakukan secara optimal. Pemanfaatan sumber daya kelautan ini dipercaya bisa menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang bisa diandalkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan.

Persoalan kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh sudah sejak lama menjadi fokus dalam pembangunan daerah, bahkan sektor ini telah menjadi sektor produktif ketiga dalam program rehabilitasi, rekonstruksi, pembangunan dan juga pengembangan wilayah Aceh. Bahkan Pemerintah Aceh sendiri secara spesifik telah membuat Qanun khusus yang membahas detail tentang pengelolaan sektor perikanan yaitu Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kelautan dan Perikanan. Qanun ini dijadikan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan sektor perikanan Aceh saat ini. Salah satu bentuk realisasi dari rencana program pengembangan sektor perikanan di Aceh adalah adanya pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Lampulo di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Gampong Lampulo terletak dipinggir sungai Krueng Aceh dan juga berdekatan dengan muara. Hal ini menjadi potensi bagi gampong dalam usaha mensejahterakan masyarakat gampong. Dengan besarnya potensi perikanan di Gampong Lampulo 35% dari sebagian besar masyarakatnya menggantungkan pencahariannya dengan menjadi

nelayan. Oleh karena itu Gampong Lampulo merupakan wilayah yang penting apabila ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Sejalan dengan penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial ekonomi, nilai Gampong Lampulo terus bertambah. Budaya maritim menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya yang terkait dengan maritim dan kelautan. Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar seharusnya dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat. Daerah pesisir mempunyai potensi serta sumber daya yang melimpah, oleh karena itu seharusnya masyarakat pesisir bisa lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat lainnya (Rusydy & Mansur, 2021).

Namun pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat pesisir belum bisa dikatakan sejahtera bahkan mereka masih dilanda kemiskinan karena mereka belum dapat memanfaatkan potensi besar yang ada di bagian pesisir. Penelitian terkait kesejahteraan masyarakat pesisir sudah banyak dilakukan, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mawardati (2019) penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi perikanan yang cukup besar sebagai motor penggerak ekonomi wilayah, namun tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap belum maksimal, hanya 27.659,5 ton atau 10,16% dari total potensi lestari Provinsi Aceh. Kontribusi pendapatan nelayan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya pun hanya sebesar Rp 13.340/kapita/hari atau Rp 346.840/kapita/bulan. Yang

mana artinya pendapatan nelayan masih berada dibawah garis kemiskinan dan tergolong dalam kategori paling miskin.

Penelitian terdahulu hanya berfokus pada potensi sumberdaya perikanan yang ada di Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan program Minapolitan dengan tujuan untuk menganalisis hubungan tingkat kemiskinan nelayan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada di Kabupaten tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti mencoba mengkaji upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat mengoptimalkan program tersebut untuk mencapai tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan yang maksimal. Oleh karena itu penelitian ini akan menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan membahas potensi, kendala dalam pengelolaannya serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan dalam pengelolaan sumber daya laut, yaitu konsep *blue economy* dalam mewujudkan tujuan daripada SDGs.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan desa pesisir sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun perekonomian yang ada di sebuah daerah. Dengan demikian peneliti merasa tertarik untuk dilakukannya penelitian dengan berjudul “**Analisis Potensi Desa Pesisir Berbasis *Blue Economy* Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals***”

(Studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana potensi desa pesisir dalam mewujudkan tujuan *Sustainable Development Goals Life Below Water* di Gampong Lampulo?
2. Apa kendala dalam mengelola potensi desa pesisir menggunakan konsep *blue economy* untuk mewujudkan tujuan *Sustainable Development Goals Life Below Water* di Gampong Lampulo?
3. Apa upaya dan solusi yang telah dilakukan pemerintah menggunakan konsep *blue economy* untuk mewujudkan tujuan *Sustainable Development Goals Life Below Water* di Gampong Lampulo?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah penelitian yang diungkapkan, di tentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui bagaimana potensi desa pesisir dalam mewujudkan tujuan *Sustainable Development Goals Life Below Water* menggunakan konsep *blue economy* di Gampong Lampulo?

2. Mengetahui apa kendala dalam mengelola potensi desa pesisir menggunakan konsep *blue economy* untuk mewujudkan tujuan *Sustainable Development Goals Life Below Water* di Gampong Lampulo?
3. Mengetahui apa upaya dan solusi yang telah dilakukan pemerintah dalam mendukung keberhasilan penerapan konsep *Blue Economy* Untuk Mewujudkan Tujuan *Sustainable Development Goals Life Below Water* di Gampong Lampulo?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian tentang potensi desa pesisir berbasis *blue economy* dalam mewujudkan *sustainable development goals*. Penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi dan gambaran tentang potensi desa pesisir berbasis *blue economy*. Membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan desa pesisir secara berkelanjutan.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian diharapkan akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan desa pesisir yang berkelanjutan, khususnya pada tujuan ke-14 yaitu *Life Below Water*.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan agar penelitian lebih teratur dan terarah. Berikut ini sistematika penulisannya :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi. Secara ringkas menerapkan kerangka pemikiran yang sesuai dengan teori atau fakta yang ada di lapangan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, informan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan tentang hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian dan analisisnya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran dan masukan untuk pihak terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sustainable Development Goals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB) adalah agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. SDGs merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara (Irhamisyah, 2019). Konsep ini dikemukakan pada Konferensi PBB Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2012. SDGs diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep MGDs sekarang diganti dengan SDGs. SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan melindungi lingkungan.

SDGs adalah konsep pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang dan masa depan masyarakat di seluruh dunia, tanpa menggunakan sumber daya alam diluar daya dukung dan daya tampung bumi. SDGs menetapkan

serangkaian tujuan yang dapat diterapkan secara universal yang dapat diterapkan ketika menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan yaitu lingkungan, masyarakat, dan juga ekonomi (Center Universitas Brawijaya, 2023). Terdapat empat pilar utama yang menopang SDGs, pertama pilar pembangunan sosial yaitu tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kedua, pilar pembangunan ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Selanjutnya ketiga pilar pembangunan lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Terakhir pilar pembangunan hukum dan tata kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum (Setyawati et al., 2021).

SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *“No One Left Behind”* (Center Universitas Brawijaya, 2023). SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang berbeda yang diharapkan akan dapat dicapai pada tahun 2023. Adapun 17 tujuan SDGs yaitu meliputi:

1. Tanpa Kemiskinan, yaitu menghapus kemiskinan dalam bentuk apapun diseluruh dunia yang terdiri dari 5 target.
2. Tanpa Kelaparan, yaitu mengakhiri kelaparan dengan mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan yang terdiri dari 5 target.
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur yang terdiri dari 9 target.
4. Pendidikan Berkualitas. Menjamin pemerataan Pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang yang terdiri dari 7 target.
5. Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan yang terdiri dari 6 target.
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang yang terdiri dari 6 target.
7. Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang yang terdiri dari 3 target.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang yang terdiri dari 10 target.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur. membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi yang terdiri dari 5 target.
10. Berkurangnya Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik didalam sebuah negara maupun diantara negara-negara di dunia yang terdiri dari 7 target.
11. Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan. Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan yang terdiri dari 7 target.
12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi yang terdiri dari 8 target.
13. Penanganan Perubahan Iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya yang terdiri dari 3 target.
14. Ekosistem Lautan. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan yang terdiri dari 7 target.
15. Ekosistem Daratan. Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah yang terdiri dari 9 target.
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh. Meningkatkan perdamaian terasuk mastarakat untuk

pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan yang terdiri dari 10 target.

17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 19 target.

2.1.1 SDGs *Life Below Water*

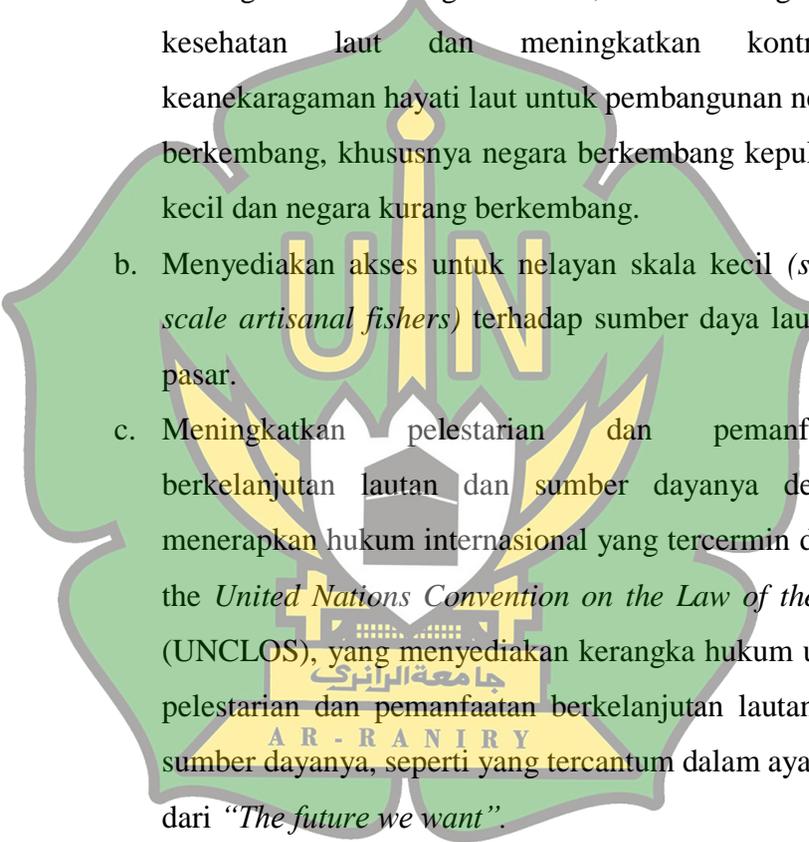
Salah satu tujuan pembangunan yang membutuhkan perhatian lebih adalah tujuan SDGs *Life Below Water* yaitu Ekosistem Lautan, yang mana tujuan ini memfokuskan pada pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan (Hastuti et al., 2022). Secara khusus, Indonesia sangat berkepentingan terhadap tujuan SDGs *Life Below Water* tersebut karena Indonesia merupakan negara maritim, jumlah pulau terbanyak di dunia (*archipelagic state*). Sumber daya kelautan memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia, namun demikian pengaturan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak terjadi kerusakan ekosistemnya seperti yang terjadi pada sumberdaya daratan (Humaida et al., 2020). Berbagai sumber daya maritim tersebut sangat potensial untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama yang tinggal di daerah pesisir (Dermawan, 2019).

SDGs menciptakan kerangka kerja berkelanjutan untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut dan pantai dari polusi yang berasal dari darat, juga untuk menyadarkan akan dampak pengasaman samudera (Bappenas, 2023). Memperkuat perlindungan dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui hukum internasional juga akan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi samudera. Melindungi lautan adalah satu dari 17 tujuan global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dan pendekatan terpadu sangat penting demi kemajuan di seluruh tujuan. Adapun 7 target dari tujuan ke-14 *Life Below Water* yaitu meliputi:

1. Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.
2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.
3. Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.
4. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan,

penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.

5. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.
6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada *The World Trade Organization*.
7. Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.

- 
- a. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan *The Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines* tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.
- b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar.
- c. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam *the United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari “*The future we want*”.

2.1.2 Konsep SDGs dalam Ekonomi Islam

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar didunia, termasuk negara yang memposisikan aspek agama dan negara sebagai dua hal yang saling melengkapi seperti halnya simbiosis mutualisme. Hal ini dapat dilihat dari dasar negara

Indonesia, Pancasila sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang maha esa” menjadi bukti bahwasanya dalam pelaksanaan pemerintahannya indonesia tidak lepas dari agama sebagai landasan moral dan juga etika (Humaida et al., 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 118 ayat (1) pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Islam merupakan agama yang mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia dengan urusan akhirat termasuk perihal perintah agar manusia mampu menjaga dan memberdayakan lingkungan dengan cara dan porsi yang tepat. Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya. Manusia diperbolehkan memanfaatkan kekayaan alam sebagai bekal beribadah kepada Allah. Kehidupan makhluk hidup dimuka bumi baik tumbuh-tumbuhan, binatang, maupun manusia saling terkait dalam satu kesatuan lingkungan hidup yang mengharuskan keduanya tetap selaras dan harmonis. Al Qur’an juga dengan tegas melarang perusakan dibumi dan supaya manusia dapat menjaga keseimbangan alam. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Qasas (28): 77.

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَىكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Dalam Al Qur'an surat Al-Qasas menjelaskan, Allah dengan tegas menyatakan pelarangan atas perusakan di bumi dan anjuran kepada manusia untuk menjaga keseimbangan alam. Allah menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, dan hal ini mengandung makna keseimbangan. Keseimbangan yang diciptakan Allah SWT dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung, dan baru akan terganggu apabila terjadi suatu keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa itu terjadi dalam bentuk bencana alam. Bencana alam itu ada yang di luar penguasaan manusia, seperti gempa tektonik, gempa yang disebabkan terjadinya pergeseran kerak bumi (Sarifudin, 2015).

Dari sekian banyak ayat yang membahas tentang lingkungan hidup, ayat yang memiliki korelasi dengan pembahasan SDGs yaitu

menghindari kerusakan dan menjaga keseimbangan alam adalah dalam QS. Al-Mulk (67): 3 yang berbunyi:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ۗ فَارْجِعِ
الْبَصَرَ ۗ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

Artinya : “Allah yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang”.

Allah SWT adalah sang pemilik dan pencipta seluruh alam semesta, apa yang terjadi di kehidupan semua atas kehendak-Nya dan manusia sebagai *khalifah* Allah di bumi diamanahkan dan diberikan kepercayaan oleh-Nya untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan dengan baik, karena manusia memiliki peranan penting terkait bagaimana siklus ekosistem kehidupan akan berlangsung baik di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Para ahli tafsir berpendapat bahwa penyebab kerusakan lingkungan bukan dikarenakan oleh aktivitas dan perilaku manusia secara langsung misalnya seperti penggunaan sumber daya alam yang berlebihan tetapi lebih kepada konteks perilaku non-fisik yang berkaitan dengan sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh manusia misalnya seperti keserakahan.

Dalam pandangan Islam SDGs menganjurkan manusia untuk selalu mengelola lingkungan agar tetap seimbang sesuai dengan

manfaatnya masing-masing dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Islam tidak menolak perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka dari itu manusia bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengembangkan kreativitasnya agar menemukan formula terbaik dalam menjaga lingkungan. SDGs bisa berjalan ketika manusia bisa menanamkan nilai-nilai keIslaman dalam dirinya melalui pendidikan sejak dini, agar keinginan manusia atas dasar sifat serakah untuk merusak lingkungan demi mendapatkan keuntungan dapat diminimalisir (Ramadina, 2021).

Islam memiliki fleksibilitas dan pemikiran yang searah dengan tujuan SDGs yang mana tujuannya yaitu memutus rantai kemiskinan, mengatasi kesenjangan, dan menghentikan perubahan iklim global, Islam juga memiliki cara untuk memerangi kemiskinan dengan zakat (sedekah), puasa, dan pola hidup yang minimalis, kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam memperjuangkan haknya, bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan, tidak merusak ekosistem laut dan menjaga keseimbangan alam semesta.

2.2 Blue Economy

Blue economy diperkenalkan pertama kali oleh Gunter Pauli pada tahun 2010 melalui bukunya yang berjudul *The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, and 100 million jobs*. Konsep *blue economy* merupakan suatu gagasan pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan pengelolaan sumber daya alam lokal secara bijaksana dengan mendorong kreativitas, inovasi dan efisiensi, dan

efektifitas tanpa menghasilkan limbah. Prinsip dasar dari konsep ini menjaga kelestarian ekosistem dengan menciptakan suatu ekonomi tanpa residu, limbah atau sampah.

Bappenas (2020) mendefinisikan *blue economy* sebagai sebuah pendekatan untuk mendorong pengelolaan kelautan berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut dan pesisir serta ekosistemnya yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, dan minimalisasi limbah. *Blue economy* dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan secara keseluruhan, sehingga sumber daya laut yang diolah akan dimanfaatkan secara optimal sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional. Pendekatan *blue economy* ditetapkan untuk memfasilitasi pembangunan yang tepat dan mengelola kepentingan yang bersaing dalam ruang laut tanpa menempatkan prioritas ekonomi dalam persaingan dengan kebutuhan ekologis atau sosial (Sambodo et al., 2023).

Tujuan *blue economy* adalah bagaimana pemakaian sumber daya alam secara efisien, tidak ada lagi limbah, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat dan menjaga ekosistem kelautan. Oleh karena itu, perlu gagasan dan wawasan mengenai pengembangan ekonomi kelautan yang handal, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membangun sistem hukum laut yang jelas maupun penegakan kedaulatan secara nyata (Sitorus, 2018). Konsep *blue economy* dalam sektor kelautan dikenal sebagai konsep yang

berkelanjutan. Dimana *blue economy* pada sektor kelautan, dimanfaatkan dan dikelola secara bersiklus dengan konsep *back to nature*. *Blue economy* hadir sebagai alternatif kebijakan dengan tujuan mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. *Blue economy* mengharuskan setiap aktifitas ekonomi harus mampu menjamin terlindungnya lingkungan dari pengaruh sisa eksploitasi dan ekstraksi sumberdaya ekonomi, aktifitas perekonomian yang berlangsung harus berada pada level rendah karbon (*low carbon economy*) yang selama ini berorientasi pada perburuan maksimalisasi profit jangka pendek dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Konsep *blue economy* mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2012, sejak saat itu penerapan *blue economy* mulai dibahas dan bahkan menjadi bagian dari rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019. Seiring berjalannya waktu *blue economy* sering dikaitkan dengan pengembangan daerah pesisir. Konsep *blue economy* sejalan dengan konsep *green economy* yang ramah lingkungan dan difokuskan pada negara-negara berkembang dengan wilayah perairan (laut), yang biasa dikenal dengan *Small Island Development States* (SIDS). *Blue economy* dalam hal ini ditujukan untuk mengatasi kelaparan, mengurangi kemiskinan, menciptakan kehidupan laut yang berkelanjutan, mengurangi resiko bencana didaerah pesisir, dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Definisi *blue economy* dalam konteks Indonesia mengacu pada penjelasan Pasal 14 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Laut, yaitu: "*Blue economy* adalah pendekatan untuk mempromosikan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut dan pesisir serta ekosistemnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan pemborosan dan pendapatan ganda." Terlepas dari perbedaan dalam formulasi, berbagai definisi memiliki karakteristik inti yang sama, yaitu pentingnya menyeimbangkan kebutuhan saat ini untuk memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan ekonomi dan sosial sambil meminimalkan, jika tidak menghilangkan, potensi risiko lingkungan terhadap kelestarian laut (Sambodo et al., 2023). *Blue economy* disebutkan dalam Undang-Undang kelautan merupakan indikasi bahwa Indonesia berkomitmen untuk menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara maritim dan merupakan salah satu kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut dan garis pantai yang sangat luas. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam memanfaatkan dan mengelola berbagai sumber daya perairan yang terdapat di wilayah kekuasaannya tersebut. Selama ini, salah satu sumber daya perairan yang membuat nama Indonesia dikenal oleh dunia yaitu sumber daya perikanan yang sangat melimpah (Sitorus, 2018). Bagi Indonesia sendiri *blue economy* ini lebih mengarah pada pembangunan kelautan dan

perikanan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep yang di perkenalkan oleh *United Nations Environment Program* (UNEP), yaitu bahwasanya di wilayah seperti negara negara Kepulauan Pasifik, pembangunan ekonomi tidak hanya mengenai laut saja, namun memiliki cakupan yang jauh lebih luas, dan melibatkan banyak sektor pada banyak skala yang berbeda (Mahardianingtyas et al., 2019).

Visi pengembangan *blue economy* di Indonesia pada tahun 2045 adalah untuk mewujudkan bahwa “Sumber daya pesisir dan laut kita yang beragam dikelola secara berkelanjutan melalui *blue economy* berbasis pengetahuan untuk menciptakan kemakmuran sosial-ekonomi, memastikan lingkungan laut yang sehat dan memperkuat ketahanan untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan”. Indonesia menempatkan perlindungan sumber daya dan lingkungannya sebagai prioritas, sehingga mereka dapat menjadi modalitas yang kuat untuk tujuan pembangunan. Pengamanan akan dilaksanakan melalui penggunaan informasi, data, dan penelitian yang lebih baik, dilengkapi dengan penguatan kemampuan teknologi dan inovasi, untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi bagi masyarakat, memastikan lingkungan laut yang sehat, dan memperkuat ketahanan untuk saat ini dan di masa depan. Pengembangan *blue economy* bertujuan untuk menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif bagi Indonesia (Sambodo et al., 2023). Hal ini bertumpu pada keseimbangan pilar sosial, ekonomi dan lingkungan pembangunan berkelanjutan, dan

menerjemahkan pencapaian ketiga pilar tersebut menjadi tiga target utama, yaitu kontribusi PDB sektor maritim, lapangan kerja maritim, dan persentase lingkungan laut Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut (KKP).

Komitmen untuk mencapai ketiga target tersebut merupakan langkah menuju pencapaian visi *blue economy* Indonesia. (Sambodo et al., 2023) membagi sasarannya menjadi sebagai berikut:

1. Pelestarian lingkungan laut merupakan target utama untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kesejahteraan sosial. Indonesia berupaya untuk meningkatkan kawasan konservasi lautnya menjadi 30 persen atau 97,5 juta hektar perairannya pada tahun 2045. Upaya ini akan melestarikan keanekaragaman hayati laut dan mengisi kembali perikanan sambil menyediakan jasa ekosistem seperti penyerapan karbon dan melindungi aset berharga. Ini akan melindungi ekosistem penting seperti bakau, padang lamun dan terumbu karang.
2. Kontribusi PDB sektor maritim merupakan target utama untuk menggambarkan pentingnya sektor maritim dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Pada 2045, ditargetkan kontribusi PDB sektor maritim mencapai 15 persen. Target tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
3. Pekerjaan adalah target utama untuk menggambarkan peran sektor maritim dalam menciptakan dan meningkatkan

Siklus *blue economy* adalah siklus kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Siklus ini dimulai dari eksplorasi sumber daya laut, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya tersebut, hingga akhirnya menghasilkan produk atau jasa yang dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

1. Sumber Daya Laut

Sumber daya laut adalah segala sesuatu yang ada di laut, termasuk ikan, biota laut lainnya, dan jasa maritim. Sumber daya laut memiliki peran penting dalam siklus *blue economy*, yaitu sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai ekonomi.

2. Nelayan

Nelayan adalah orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan biota laut lainnya. Nelayan memiliki peran penting dalam siklus *blue economy*, yaitu sebagai penyedia hasil laut. Hasil laut yang ditangkap oleh nelayan kemudian diolah dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nelayan berperan dalam siklus *blue economy* melalui kegiatan penangkapan ikan dan biota laut lainnya. Nelayan juga mempunyai peran dalam menjaga kelestarian sumber daya laut dengan menerapkan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Nelayan juga memiliki peran yang penting dalam aspek-aspek pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan, distribusi dan penyediaan, selain itu nelayan juga

berperan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan sehingga ekosistem sumber daya laut bisa digunakan untuk generasi mendatang.

3. Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam siklus *blue economy*, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan investor. Sebagai regulator, pemerintah bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi di laut agar berkelanjutan. Sebagai fasilitator, pemerintah bertugas untuk menyediakan infrastruktur dan layanan yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi di laut. Sebagai investor, pemerintah bertugas untuk berinvestasi dalam kegiatan ekonomi di laut. Pemerintah berperan dalam siklus *blue economy* melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Pemerintah juga berperan dalam menyediakan infrastruktur dan layanan yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi di laut, seperti pelabuhan, pasar ikan, dan fasilitas pengolahan hasil laut.

4. Pasar

Pasar memiliki peran penting dalam siklus *blue economy*, yaitu sebagai tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli hasil laut. Pasar juga berperan dalam menentukan harga hasil laut. Pasar berperan dalam siklus *blue economy* melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Harga hasil

laut ditentukan oleh permintaan dan penawaran hasil laut di pasar.

5. Produksi

Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dalam konteks siklus *blue economy*, produksi dapat berupa penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan hasil laut, dan jasa maritim. Produksi berperan dalam siklus *blue economy* melalui kegiatan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai ekonomi. Produk atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan produksi kemudian dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

6. Rumah tangga

Rumah tangga adalah unit ekonomi terkecil yang terdiri dari satu atau lebih individu. Rumah tangga berperan dalam siklus *blue economy* melalui kegiatan konsumsi dan produksi. Rumah tangga berperan dalam siklus *blue economy* melalui kegiatan konsumsi hasil laut. Hasil laut yang dikonsumsi oleh rumah tangga kemudian akan memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan. Rumah tangga juga berperan dalam siklus *blue economy* melalui kegiatan produksi hasil laut. Rumah tangga dapat berperan sebagai nelayan, pembudidaya ikan, atau pelaku usaha di bidang pengolahan hasil laut.

2.3 Potensi Desa

Pengertian desa menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan, 2016).

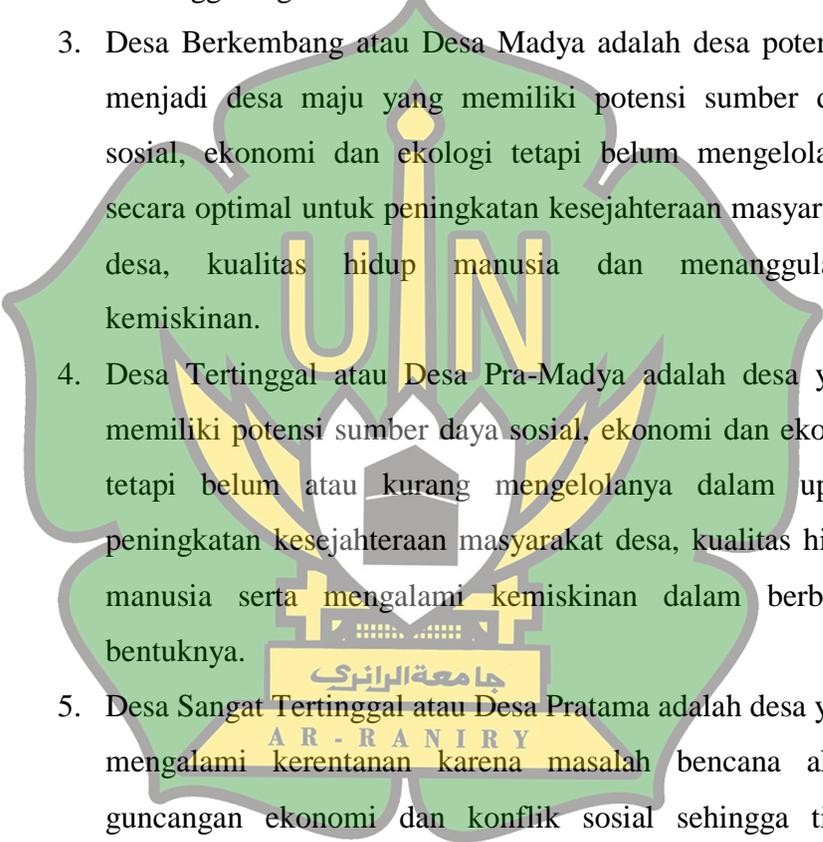
Menurut Paru et al. (2019) desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif sama dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Menurut R.H Unang Soenardjo dalam Paru et al. (2019) desa adalah sesuatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama,

memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Soleh, 2017). Kemampuan yang dimiliki suatu desa yang mungkin untuk dikembangkan tetap selamanya akan menjadi potensi bila tidak diolah, atau didayagunakan menjadi suatu realita berwujud kemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu potensi wilayah memerlukan upaya-upaya tertentu untuk membuatnya bermanfaat kepada masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh (2020) mengklasifikasikan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa, yaitu meliputi:

1. Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

- 
2. Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
 3. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
 4. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
 5. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Menurut Ainurrohmah (2022) desa berdasarkan mata pencaharian penduduknya adalah pembagian desa yang dilihat

daripada kekuatan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis desa ini bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Desa Agraris

Desa agraris adalah desa yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Disisi, perlu kita ketahui pula bahwa, istilah desa agraris bukan hanya diberikan pada desa dengan mayoritas petani di persawahan, tapi petani perkebunan dan perladangan juga merupakan kegiatan agraris. Desa agraris biasanya terletak di daerah pegunungan dan mempunyai kesuburan tanah yang bagus, sehingga mudah untuk ditanami dengan tumbuhan yang bernilai ekonomis. Jenis tumbuhan yang di desa agraris bisa berbeda-beda, tergantung pada tingkat kesuburan tanah dan juga iklim di daerah desa. Selain tanah yang subur, desa agraris juga memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah. Potensi tersebut kemudian dikembangkan dan dikelola dengan baik oleh masyarakat, sehingga menjadikan desa tersebut mayoritas kegiatannya adalah di sektor pertanian atau agraris.

2. Desa Nelayan

Desa nelayan adalah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai sebagai nelayan. Desa nelayan biasanya terletak di tepi pantai atau tidak jauh dari laut. Karakteristik fisik wilayah desa nelayan yaitu tanahnya kering dan iklimnya panas, tapi mempunyai kekayaan laut

yang melimpah. Kondisi fisik wilayah yang demikian menyebabkan sektor pertanian tidak bisa berkembang baik, bahkan mungkin tidak dapat dilakukan sama sekali, sehingga penduduk memanfaatkan kekayaan laut yang memang lebih potensial untuk untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

3. Desa Industri

Desa industri adalah mayoritas penduduknya bekerja di sektor industri. Industri yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya industri besar yang pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan seperti pabrik, tapi juga termasuk industri kecil rumahan yang dilakukan oleh warga di rumah. Sehingga bisa pula dikatakan bahwa desa industri adalah desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pengelola sebuah usaha atau industri. Lokasi desa industri biasanya jauh dari pegunungan dan laut, tapi dekat dengan daerah kota yang padat penduduk, sehingga menyebabkan desa tidak dapat membangun sektor pertanian maupun kelautan. Namun sebagai keunggulannya, desa mempunyai sumber daya manusia yang cukup. Hal ini membuat penduduk lebih mengandalkan SDM atau tenaga manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara mengelola kegiatan industri yang dibangun di wilayah desa.

Nawawi (2018) menjelaskan bahwa desa pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa di wilayah pedalaman. Perbedaan tersebut tidak semata pada aspek geografis-ekologis,

tetapi juga pada karakteristik ekonomi dan sosial-budaya. Secara geografis, desa pesisir berada di perbatasan antara daratan dan lautan. Desa pesisir memiliki akses langsung pada ekosistem pantai (pasir atau berbatu), mangrove, estuaria, padang lamun, serta ekosistem terumbu karang. Kondisi geografis-ekologis desa pesisir mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi di dalamnya. Kegiatan ekonomi di desa pesisir dicirikan oleh aktivitas pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan pesisir. Aktivitas ekonomi mencakup perikanan, perdagangan, wisata bahari, dan transportasi.

Desa pesisir merupakan wilayah yang berada disepanjang garis pantai dan memiliki hubungan erat dengan laut. Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik berupa sumber daya hayati maupun nonhayati. Sumber daya yang dapat dikembangkan didesa pesisir antara lain perikanan, kelautan, pariwisata dan juga industri (Nawawi, 2018). Sebagai sumber daya alam utama, laut menyediakan berbagai potensi ekonomi, laut menyediakan habitat bagi berbagai jenis ikan, moluska, kerang, dan organisme laut lainnya. Pemanfaatan sumber daya perikanan dengan cara yang berkelanjutan melibatkan praktik penangkapan yang bijaksana, pengelolaan stok ikan, dan pembentukan kawasan konservasi laut. Dengan demikian, perikanan berbasis kelautan dapat menjadi tulang punggung ekonomi desa pesisir dan mendukung pencapaian SDGs *Life Below Water* tentang kehidupan di bawah air.

Perikanan memainkan peran penting dalam ekonomi dan kehidupan masyarakat pesisir. Sumber daya perikanan penting bagi konsumsi lokal dan juga perdagangan. Selain itu, sektor perikanan juga menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat mata pencaharian dan juga mendukung keberlanjutan ekonomi di desa pesisir. Desa pesisir sering kali memiliki keanekaragaman sumber daya ikan yang tinggi. Perairan disekitar desa pesisir menyediakan habitat bagi berbagai jenis ikan, termasuk ikan konsumsi dan juga komersial. Keanekaragaman ini memberikan peluang bagi para nelayan lokal untuk menangkap berbagai spesies ikan, mendukung ketahanan pangan, dan menciptakan potensi ekonomi yang berkelanjutan. Perikanan tidak hanya mencakup penangkapan ikan, tetapi juga aktivitas terkait seperti pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan. Desa pesisir dapat mengembangkan industri pengolahan ikan, seperti pengeringan ikan, pembuatan produk olahan ikan, dan produksi kerajinan tangan berbasis bahan-bahan dari laut. Diversifikasi ekonomi melalui perikanan juga melibatkan pengembangan pariwisata perikanan, di mana wisatawan dapat mengalami kehidupan nelayan, mempelajari budaya perikanan, dan menikmati kuliner laut lokal.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawati et al. (2021) dengan judul Implementasi Konsep *blue economy* Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Kota Sabang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain penelitian

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi kelautan Kota Sabang yang beragam dapat dikembangkan melalui penerapan konsep *blue economy*, kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Sabang juga sangat berperan penting dalam proses pelestarian alam. Perikanan serta keindahan bawah laut yang dimiliki menjadi katalis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Blue economy* juga telah memberi *multiplier effect* terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Sabang.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawardati (2019) dengan judul Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap Pada Kawasan Minapolitan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi perikanan yang cukup besar sebagai motor penggerak ekonomi wilayah dan dapat dikembangkan secara terintegrasi dalam kawasan minapolitan, namun tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap belum maksimal, hanya 27.659,5 ton atau 10,16% dari total potensi lestari Provinsi Aceh. Diperkirakan sebanyak 10.053 nelayan atau 76,07 % nelayan tidak memiliki armada tangkap. Produksi ikan sebanyak 27.474,3 ton/tahun dan rata-rata produksi ikan di tingkat nelayan sebesar 6,67 kg/hari. Kontribusi pendapatan nelayan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga sebesar Rp 13.340/kapita/hari atau Rp 346.840/kapita/bulan. Pendapatan

nelayan dibawah garis kemiskinan dan tergolong dalam kategori paling miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh Daulay (2022) dengan judul Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep Blue Economy Dalam Mewujudkan SDGs Desa (Studi Kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi sumberdaya kelautan wilayah pesisir dalam mencapai konsep *Blue Economy* di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan wilayah pesisir Kabupaten Langkat memiliki banyak potensi sumber daya kelautan dan memiliki strategi yang dapat dilakukan dalam upaya menghadapi *Blue Economy*. Namun dalam pelaksanaannya kurang dilakukan sosialisasi secara nyata tentang program *Blue Economy*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusydy & Mansur (2021) Implementasi Konsep *Blue Economy* Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Di Masa *New Normal*. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau implemensasi konsep *blue economy* sebagai salah satu alternatif untuk membangun dan memulihkan kondisi perekonomian masyarakat pesisir dimasa new normal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengaplikasikan konsep *blue economy* dalam sektor ekonomi kelautannya. Namun secara faktual, sebagai negara kepulauan

terbesar di dunia, masyarakat pesisir di Indonesia merasakan dampak yang signifikan dari pandemi. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah penurunan harga ikan, penurunan jumlah wisatawan, kenaikan harga pakan dan obat-obatan untuk menunjang sarana produksi ikan, menurunnya daya beli dan ketahanan pangan masyarakat pesisir, dan melemahnya target pemasaran dari hasil perikanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin et al. (2022) dengan judul Strategi Kebijakan *Blue Economy* Indonesia Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Pada Era Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan di sektor kemaritiman dapat menjadi instrumen bagi Indonesia untuk memiliki posisi yang lebih unggul dan berpengaruh dipasar ekonomi regional maupun internasional. Pengembangan konsep berkelanjutan yang didasarkan pada konsep *blue economy* dapat mendukung keberhasilan pembangunan yang berbasis pada eksplorasi dan bukan eksploitasi sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Blue economy* merupakan pedoman paling tepat yang diperlukan untuk membantu memperbaiki ekonomi yang rusak dan membuat model yang lebih berkelanjutan, agar dapat membuat lapangan pekerjaan baru sekaligus mempertahankan kehidupan sosial yang sehat untuk kedepan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jayakusuma et al. (2023) dengan judul Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai yang

Berpotensi *Blue Economy* dalam Rangka Pencapaian SDGs di Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat pesisir pantai yang berpotensi *blue economy* dalam rangka pencapaian SDGs adalah ritual dan proses tata cara penangkapan ikan serta penggunaan alat tangkap ikan tradisional, pengelolaan mangrove secara arif dan seni budaya masyarakat lokal. Kearifan lokal ini mendukung *blue economy* guna pencapaian SDGs desa dalam bentuk pengelolaan wisata bahari.

Penelitian yang dilakukan oleh Ghalizda (2020) dengan judul Konsep *Blue Economy* Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *blue economy* dinilai lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya laut yang ada di Indonesia karena mengingat Indonesia kaya akan potensi hayati dan non hayati yang terkandung di lautan Indonesia. Konsep minapolitan dapat meningkatkan kinerja dari kebijakan *blue Economy* karena akan terdapat *interlinkage* yang sangat bagus untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional dan Negara. Konsep minapolitan juga akan menghasilkan produktifitas perikanan dan kelautan Indonesia menjadi lebih optimum sehingga akan dimungkinkan melakukan ekspor komoditi yang nantinya akan menjadi sumber pundi-pundi devisa negara yang dapat dimanfaatkan

untuk pembangunan ekonomi di sektor lainnya yang membutuhkan untuk dikembangkan. Sehingga akhirnya sektor kelautan dalam kebijakan *blue economy* nantinya akan dapat menjadi pilar atau tumpuan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Adiprayoga & Samiaji (2021) dengan judul *Peluang dan Strategi Ekonomi Biru Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sumatera dalam Mendukung Terwujudnya Ketahanan Pangan*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya perikanan dan minat masyarakat dalam mengelola subsektor perikanan. Pengembangan lumbung pangan nasional harus difokuskan pada sektor Ekonomi Biru. Sinergi pemangku kepentingan dapat diintegrasikan dalam membina, mengawasi dan menggerakkan masyarakat pesisir dalam mendukung kesejahteraan mereka.

Tabel 2.1

Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Implementasi Konsep <i>Blue Economy</i> Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Kota Sabang (Setyawati et al., 2021)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi kelautan Kota Sabang yang beragam dapat dikembangkan melalui penerapan konsep <i>blue economy</i> .	Persamaan: sama-sama membahas tentang potensi kelautan yang bisa dikembangkan.

			<i>economy</i> juga telah memberi <i>multiplier effect</i> terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Sabang.	Perbedaan: lokasi penelitian dilakukan.
2	Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap Pada Kawasan Minapolitan (Mawardati, 2019)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi perikanan yang cukup besar sebagai motor penggerak ekonomi wilayah, namun tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap belum maksimal.	Persamaan: sama-sama membahas tentang potensi sumberdaya perikanan. Perbedaan: penggunaan konsep minapolitan sebagai program pengembangan wilayah.
3	Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep <i>Blue Economy</i> Dalam Mewujudkan SDGs Desa (Studi Kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat) (Daulay, 2022)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah pesisir memiliki banyak potensi sumber daya kelautan dan memiliki strategi yang dapat dilakukan dalam upaya menghadapi <i>Blue Economy</i> .	Persamaan: sama-sama membahas potensi lokal dengan penggunaan konsep <i>blue economy</i> . Perbedaan: penelitian ini hanya berfokus pada teori-teori pertumbuhan ekonomi.
4	Implementasi Konsep <i>Blue Economy</i> Dalam Pembangunan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi	Persamaan: sama-sama membahas

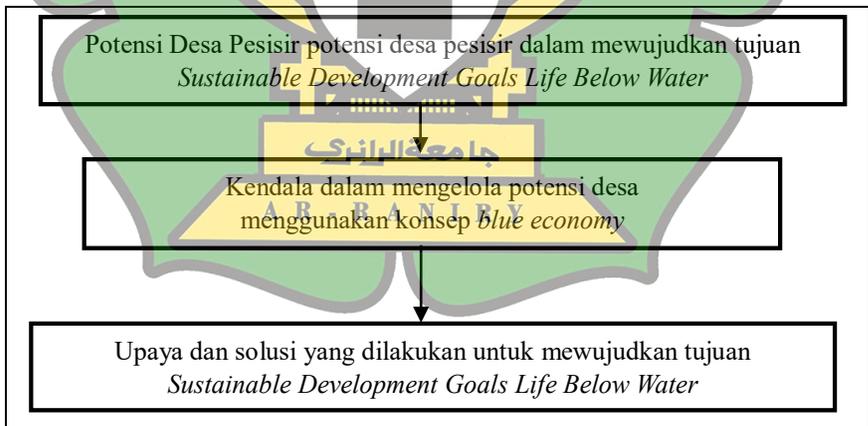
	Masyarakat Pesisir Di Masa <i>New Normal</i> (Rusydy & Mansur, 2021)		yang sangat besar untuk mengaplikasikan konsep <i>blue economy</i> dalam sektor ekonomi kelautannya.	penggunaan konsep <i>blue economy</i> . Perbedaan: penelitian ini berfokus pada penerapan <i>blue economy</i> dimasa <i>new normal</i> saja.
5	Strategi Kebijakan <i>Blue Economy</i> Indonesia Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Pada Era Joko Widodo (Wahyuddin et al., 2022)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan konsep berkelanjutan yang didasarkan pada konsep <i>blue economy</i> dapat mendukung keberhasilan pembangunan yang berbasis pada eksplorasi dan bukan eksploitasi sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.	Persamaan: sama-sama membahas penggunaan konsep <i>blue economy</i> dalam mendukung capaian SDGs. Perbedaan: penelitian ini hanya berfokus pada strategi kebijakan dengan menggabungkan konsep <i>green economy</i> dan <i>blue economy</i> .
6	Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai yang Berpotensi <i>Blue Economy</i> dalam Rangka Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> di Pulau	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat pesisir mendukung <i>blue economy</i> guna pencapaian SDGs desa dalam bentuk	Persamaan: sama-sama membahas penggunaan konsep <i>blue economy</i> untuk mencapai SDGs.

	Rupat Kabupaten Bengkulu (Jayakusuma et al., 2023)		pengelolaan wisata bahari.	Perbedaan: lokasi dilakukannya penelitian.
7	Konsep <i>Blue Economy</i> Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Ghalizda, 2020)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan <i>blue economy</i> dinilai lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya laut yang ada di Indonesia karena mengingat Indonesia kaya akan potensi hayati dan non hayati yang terkandung di lautan Indonesia.	Persamaan: sama-sama membahas penggunaan konsep <i>blue economy</i> untuk mencapai SDGs. Perbedaan: penelitian ini membahas potensi secara keseluruhan.
8	Peluang dan Strategi Ekonomi Biru Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sumatera dalam Mendukung Terwujudnya Ketahanan Pangan (Adiprayoga & Samiaji, 2021)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya perikanan dan minat masyarakat dalam mengelola subsektor perikanan dan difokuskan pada sektor Ekonomi Biru.	Persamaan: sama-sama membahas penggunaan konsep <i>blue economy</i> . Perbedaan: tidak membahas SDGs.

2.5 Kerangka Pemikiran

Untuk mencapai tujuan *Life Below Water* dari SDGs maka diperlukan sebuah konsep yang mampu menggantikan praktek ekonomi lama yang hanya fokus menghasilkan keuntungan sementara, namun memiliki dampak negatif berkepanjangan. Penggunaan konsep *blue economy* adalah jawaban dari tujuan tersebut, yang mana konsep ini tidak hanya berfokus pada kegiatan ekonomi yang hanya mengandalkan basis eksploitasi sumber daya laut, melainkan dapat menghasilkan arus pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menjamin kelestarian sumber daya dan lingkungan yang seimbang dengan penggunaannya yang optimal.

Gambar 2.2
Kerangka Penelitian



Sumber: Analisis Peneliti (2023)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari informan yaitu Panglima Laot dan nelayan.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Desember. Penelitian dilakukan tepatnya di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena Gampong Lampulo merupakan desa nelayan yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar, dan ekonomi lokalnya yang bergantung pada sektor kelautan.

3.3 Subjek dan Objek

Informan atau peserta yang memberikan umpan balik tentang suatu masalah atau yang biasa disebut dengan sampel penelitian kualitatif. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *criterion sampling*, yakni teknik pengumpulan atau pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Maksud dari pertimbangan tersebut dimisalkan orang tersebut (narasumber) dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini. Informan dari penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari panglima laot dan juga nelayan.

Tabel 3.1
Kategori Informan

No.	Kategori	Jabatan	Jumlah
1.	Informan kunci	Panglima Laot	1
2.	Informan	Nelayan	9
Jumlah			10

3.4 Operasional Variabel

Adapun panduan wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Panduan Wawancara

No.	Pertanyaan	Deskripsi
1.	Menurut anda bagaimana potensi sumber daya laut yang ada di Gampong Lampulo dalam membantu perkembangan desa?	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat seberapa besar kontribusi dan peran potensi sumber daya laut terhadap pembangunan desa dalam konteks <i>blue economy</i> dan pencapaian SDGs <i>Life Below Water</i> .
2.	Menurut anda apakah pemanfaatan sumber daya laut yang ada di Gampong Lampulo dapat memberikan manfaat bagi nelayan?	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat apakah pemanfaatan sumber daya laut yang ada di Gampong Lampulo dapat memberikan manfaat bagi nelayan.
3.	Bagaimana para nelayan di Gampong Lampulo bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya alam laut dengan lebih baik?	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat dinamika kerja sama antara nelayan dalam memanfaatkan sumber daya laut secara lebih efektif dan berkelanjutan.
4.	Adakah kerja sama atau program dari pemerintah setempat yang melibatkan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendukung pembangunan desa?	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat adanya kerja sama atau program dari pemerintah setempat yang melibatkan nelayan bertujuan untuk melihat upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan nelayan dan pembangunan desa pesisir.

5.	Apakah ada kendala yang dihadapi oleh nelayan dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut? Jika ada, bagaimana pemerintah membantu nelayan dalam mengatasi kendala ini?	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat adanya kerja sama atau program dari pemerintah setempat yang melibatkan nelayan bertujuan untuk melihat upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan nelayan dan pembangunan desa pesisir
----	---	--

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan penelitian atau percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam hal ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan-informan.

2. Observasi

Sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mendatangi Gampong Lampulo, juga pada pengusaha serta para nelayan di ga,pong tersebut.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data yang terdapat dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian untuk dapat mengumpulkan teori-teori yang merupakan variabel

terpenting dalam penelitian ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan pendukung yang terkait dengan penelitian tentang **Analisis Potensi Desa Pesisir Berbasis *Blue Economy* Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals***.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Miles dan Huberman dalam Sugiyono & Lestari (2021) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono & Lestari (2021) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Berdasarkan keterangan diatas, jelas bahwa proses reduksi data telah peneliti lakukan mulai dari penetapan fokus penelitian, menentukan pertanyaan untuk membatasi fokus penelitian, menetapkan lokasi penelitian, kerangka konsep pembahasan hingga pemilihan teknik pengumpulan data. Setelah data penelitian terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan antara hal-hal yang pokok dengan yang bukan hal pokok, dan membuang data-data yang tidak diperlukan dijadikan arsip

sehingga apabila ada keperluan pengecekan data asli dapat dicarikan kembali.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Display data dalam penelitian ini yaitu dengan penyajian data melalui ringkasan-ringkasan penting dari data-data yang telah direduksi. Artinya data yang telah dirampingkan melalui reduksi data, selanjutnya dipilah lagi untuk disajikan sebagai data atau temuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Menurut Sugiyono & Lestari (2021) kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Setelah analisis dilakukan, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan pertanyaan pada fokus penelitian. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan dan melakukan cek ulang terhadap data-data yang terkumpul sejak proses pengumpulan data dilakukan hingga tahap perumusan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan dan rumusan yang tidak relevan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Gambaran lokasi penelitian merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian, untuk memberikan gambaran tentang kondisi geografis dan keadaan umum penduduk lokasi penelitian.

4.1.1 Kondisi Geografis Gampong Lampulo

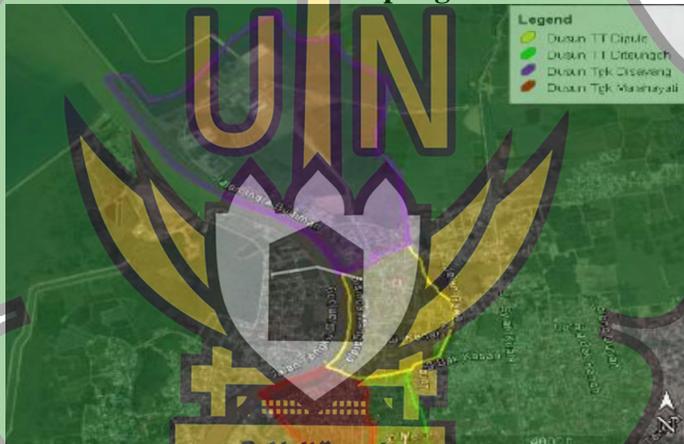
Gampong Lampulo adalah salah satu gampong di Kota Banda Aceh, tepatnya di Kecamatan Kuta Alam. Gampong ini terletak di pinggiran Krueng Aceh, yang bermuara ke laut. Oleh karena itu, gampong ini sering disebut dengan sebutan Kuala. Menurut cerita lama, gampong ini dahulunya sering mengalami banjir akibat air Krueng Aceh yang menguap. Banjir tersebut disebut dengan "lam", yang dalam bahasa Indonesia berarti "tenggelam". Sedangkan "pulo" berarti "pulau", yang merujuk pada keadaan gampong ini yang dulunya merupakan daerah hutan pinggiran laut.

Pada tahun 1985 Gampong Lampulo berubah status tata Kota, yaitu dengan terbentuknya Kotamadya Banda Aceh dan menjadi salah satu Gampong yang berada di kecamatan Kuta Alam. Awalnya Gampong ini bersatu dengan Gampong Lampulo Ujong Peunayong, yang sekarang terpisah menjadi tiga gampong, yaitu Lamdingin, Lampulo, dan Mulia, yang tunduk pada Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Gampong pertama terjadi pemekaran adalah Gampong Lamdingin yaitu pada tahun 1958, baru

pada tahun 1963 Lampulo Ujoeng Peunayong terpisah pada masa pemerintah Keuchik Nego, untuk sebelah selatan menjadi Gampong Mulia dan sebelah utara menjadi Gampong Lampulo.

Gampong Lampulo merupakan gampong yang terletak di Kecamatan Kuta Alam dengan luas wilayah 154,5 Ha atau 1, 545 km² yang terdiri dari empat (4) Dusun antara lain: T. Tuan Dipulo, Malahayati, Tgk. Disayang dan T. Tingoeh.

Gambar 4.1
Peta Gampong



Sumber : RPMG Lampulo (2020)

Adapun wilayah yang berbatasan langsung dengan Gampong Lampulo adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Lamdingin dan Syiah Kuala
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Mulia
3. Sebelah bengan Krueng Aceh
4. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Lamdingin.

Visi dari pemerintahan Desa ini adalah “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Menguasai IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan IMTAQ (Iman dan Taqwa) serta Mandiri dan Amanah”.

Adapun misi dari pemerintah desa ini adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan Syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan guna memantapkan kualitas IMTAQ.
2. Meningkatkan akses Warga Gampong dalam menempuh pendidikan dan penguasaan teknologi.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas produksi dan peningkatan produktivitas.
4. Memberdayakan usaha ekonomi dan kreativitas warga dengan berbasis pada pemanfaatan potensi ekonomi lokal.
5. Meningkatkan kemampuan aparatur perangkat Pemerintahan Gampong melalui pemantapan kinerja, disiplin, layanan, tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi.
6. Meningkatkan partisipasi pemuda dan kaum perempuan dalam pembangunan Gampong.
7. Memantapkan Wawasan Kebangsaan dan Bernegara dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.1.2 Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Gampong Lampulo pada umumnya adalah pendatang yang menetap menjadi penduduk yang datang dari daerah

lain baik dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh maupun dari Provinsi lain. Menurut Profil Gampong Lampulo tahun 2021, desa Lampulo berpenduduk sebesar 5.443 jiwa yang terdiri dari 2.792 jiwa laki-laki dan 2.651 jiwa perempuan yang tersebar di empat Dusun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin

No.	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Total
			L	P	
1.	T. Tuan Dipulo	532	1091	991	2.082
2.	Malahayati	368	725	774	1.499
3.	Tgk. Disayang	244	498	442	940
4.	T. Teungoh	215	478	444	922
Jumlah		1359	2792	2651	5443

Sumber: Profil Gampong Lampulo (2021)

Tabel 4.1 diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk terbanyak di desa Lampulo ada di Dusun T. Tuan Dipulo sebanyak 2.082 Jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 1.091 Jiwa dan perempuan sebanyak 991 Jiwa, dan untuk jumlah penduduk yang paling sedikit ada di Dusun T. Teungoh yaitu sebanyak 922 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 478 Jiwa dan 444 Jiwa penduduk perempuan.

Gampong Lampulo terletak di wilayah pesisir pantai, yang memiliki tempat pelelangan ikan (TPI) dan pelabuhan untuk nelayan. Sebagaimana pada umumnya penduduk yang tinggal di daerah pesisir, masyarakat Lampulo bermata pencaharian sebagai

nelayan. Dari segi ekonomi, usaha perikanan merupakan mata pencaharian pokok yang dilakoni oleh masyarakat Lampulo. Sebagian penduduk juga memiliki profesi lain, seperti Pegawai Negeri Sipil, ada juga yang menjadi tukang pembuat boat nelayan dan selebihya adalah pedagang. Untuk lebih jelas dapat di lihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	983
2.	TNI/Polri	100
3.	Pedagang	881
4.	Petani	5
5.	Nelayan	333
6.	Pertukangan	224
7.	Lain-lain	2014
Jumlah		4.540

Sumber: Profil Gampong Lampulo (2021)

Tabel 4.2 diatas merupakan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan total keseluruhan sebanyak 4.540 jiwa. Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Lampulo yang berkerja sebagai nelayan sebanyak 333 jiwa. Namun seperti yang kita ketahui, banyaknya jumlah nelayan di daerah tersebut, tidak hanya berasal dari masyarakat Lampulo saja, melainkan juga berasal dari Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraksa, Kecamatan Banda Raya,

Kecamatan Syiah Kuala, banyak juga nelayan-nelayan yang berasal dari luar daerah Banda Aceh, seperti Aceh Besar, Pidie, Bireuen dan lainnya.

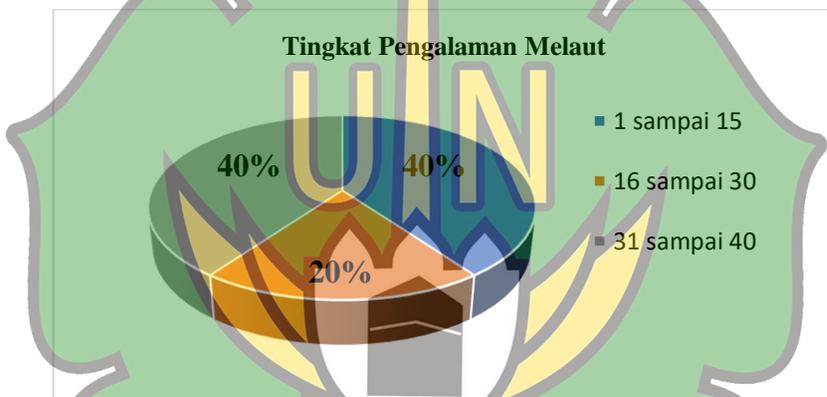
4.2 Deskripsi Informan Penelitian

Informan penelitian ini secara keseluruhan adalah nelayan yang berjenis kelamin laki-laki. Dikarenakan budaya patriarki di Aceh telah mengakar sejak lama, budaya ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pekerjaan. Laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Oleh karena itulah laki-laki yang biasanya bekerja diluar rumah dan perempuan biasanya tidak diizinkan untuk menjadi nelayan.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, nelayan di Gampong Lampulo didominasi oleh nelayan dengan tingkat pendidikan SD, dikarenakan pada jamannya mereka, para nelayan lebih tertarik ikut orang tua melaut dari pada ke sekolah, dan masih tertanam anggapan bahwa jika sudah tahu membaca dan menulis tidak perlu sekolah tinggi-tinggi walaupun fasilitas sekolah tersedia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moha et al., (2019) bahwasanya keluarga nelayan rata-rata tidak lulus pendidikan dasar (SD) dengan persentase 64% untuk suami dan 80% untuk istri. Pada kenyataannya tingkat pendidikan yang rendah dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan nelayan dan keluarganya. Nelayan dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas.

Sementara itu, pengalaman merupakan pengetahuan atau keterampilan seseorang yang dapat diketahui dan dikuasai karena kegiatan yang sering dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Nelayan yang telah berpengalaman selama bertahun-tahun biasanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik daripada nelayan yang baru memulai. Berikut tingkat pengalaman melaut informan:

Gambar 4.2
Informan Berdasarkan Tingkat Pengalaman Melaut



Sumber: Data Diolah (2023)

Dari gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa pengalaman informan sebagai nelayan selama 1-15 tahun sebanyak 4 orang (40%), pengalaman selama 16-30 tahun sebanyak 2 orang (20%), pengalaman selama 31-40 tahun sebanyak sebanyak 4 orang (40%). Pengalaman nelayan akan mempengaruhi usaha penangkapan ikan, semakin lama pengalaman seorang nelayan maka nelayan tersebut akan lebih memahami situasi dan kondisi yang dihadapapi pada saat melakukan usaha penangkapan ikan. Menurut pendapat Indara et al., (2017) pengalaman sebagai nelayan secara langsung maupun tidak,

memberikan pengaruh kepada hasil penangkapan ikan. Semakin lama seseorang mempunyai pengalaman sebagai nelayan, semakin besar hasil dari penangkapan ikan dan pendapatan yang diperoleh, semakin lama pengalaman nelayan maka semakin peka nelayan terhadap keadaan pada saat melakukan usaha penangkapan ikan.

4.3 Potensi Desa Pesisir dalam mewujudkan Tujuan SDGs *Life Below Water*

4.3.1 Potensi Perikanan Gampong Lampulo

Adapun hasil wawancara dengan panglima laot Gampong Lampulo, yaitu Bapak HD (50 tahun), beliau sudah melaut selama 20 tahun. Dari hasil wawancara beliau mengatakan bahwa *“Gampong Lampulo punya potensi perikanan cukup besar; hasil perikanan tangkapnya juga cukup membantu desa”* (wawancara, 7 Desember 2023). Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak S (nelayan, 53 tahun) yang mengatakan bahwa *“Potensi perikanan disini cukup besar; dan saya rasa sangat berdampak pada desa. Apalagi ini adalah mata pencaharian utama masyarakat, hasil tangkapan ikan kami juga termasuk yang paling besar di Kota Banda Aceh ini”* (wawancara, 7 Desember 2023).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa potensi perikanan di Gampong Lampulo memiliki peran yang krusial dalam memberikan sumber penghasilan yang stabil bagi warga desa. Ketersediaan sumber daya laut yang melimpah di sekitar wilayah pesisir desa memungkinkan para nelayan untuk menangkap berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya secara berkelanjutan.

Gambar 4.3
Jumlah Produksi Ikan Lampulo



Sumber: Google (2023)

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa hasil tangkapan ikan nelayan di Lampulo meningkat dari tahun ke tahunnya, hal ini dibuktikan oleh data dari Pelabuhan Perikanan Lampulo tahun 2023 jumlah produksi ikan Lampulo mencapai 1.470,59 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp 19.870.992.605. Peningkatan jumlah perikanan ini berdampak positif terhadap pendapatan nelayan. Hal ini dikarenakan jumlah perikanan yang meningkat akan meningkatkan jumlah hasil tangkapan ikan. Semakin banyak hasil tangkapan ikan, maka semakin besar pula pendapatan nelayan. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas perikanan ini memainkan peran penting dalam memastikan penghasilan yang stabil bagi penduduk setempat. Selain itu, dengan adanya penghasilan yang konsisten dari sektor perikanan ini, masyarakat di Gampong Lampulo memiliki kesempatan untuk meningkatkan daya beli mereka.

Selain memberikan sumber penghasilan yang stabil, potensi perikanan di Gampong Lampulo juga memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui kegiatan perikanan yang berkelanjutan, desa ini dapat mengalami peningkatan ekonomi yang positif. Pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas perikanan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dengan memicu siklus ekonomi lokal. Hal ini dapat mendorong investasi di sektor lain, menciptakan peluang bisnis baru, serta membantu dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian, potensi perikanan yang ada di Gampong Lampulo bukan hanya menjadi sumber pendapatan yang stabil, tetapi juga menjadi kunci bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M (nelayan, 35 tahun) mengatakan bahwa *“Sumber daya laut yang ada di Gampong Lampulo cukup bermanfaat bagi kami para nelayan, apalagi mayoritas dari kami hanya bekerja sebagai nelayan saja”* (wawancara, 7 Desember 2023). Keterangan tersebut menunjukkan bahwa potensi perikanan di Gampong Lampulo membawa manfaat besar bagi nelayan yang bergantung pada laut sebagai sumber mata pencahariannya yang utama. Bagi nelayan sumber daya laut merupakan aset utama yang memungkinkan mereka untuk mencari nafkah dan menghasilkan pendapatan bagi kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan pada laut sebagai satu-satunya sumber mata

pencapaian membuat potensi perikanan di desa ini sangat penting bagi kelangsungan hidup dan keberlangsungan ekonomi para nelayan serta keluarga mereka. Oleh karena itu, potensi perikanan memberikan manfaat signifikan bagi nelayan yang bergantung pada laut, perlindungan dan keberlanjutan sumber daya laut menjadi krusial untuk memastikan kelangsungan mata pencaharian mereka di masa mendatang.

Secara keseluruhan hasil wawancara dapat diketahui adanya hubungan yang kompleks antara potensi perikanan di Gampong Lampulo dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam konteks keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Potensi perikanan yang melimpah di daerah tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi Islam. Potensi perikanan yang ada di Gampong Lampulo memiliki hubungan yang erat dengan SDGs *Life Below Water*. Potensi perikanan memegang peranan penting dalam mendukung aspek ekonomi kehidupan di bawah air. Dengan sumber daya laut yang melimpah, para nelayan dapat menangkap ikan secara berkelanjutan, mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir, yang sesuai dengan tujuan SDGs *Life Below Water*. Pendapatan stabil dari sektor perikanan ini juga memungkinkan peningkatan daya beli masyarakat Gampong Lampulo, memperbaiki akses terhadap kebutuhan sehari-hari, pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang semuanya mendukung kesejahteraan dan taraf hidup mereka.

Namun, ketergantungan yang begitu besar pada laut juga membawa risiko bagi nelayan di Gampong Lampulo. Nelayan akan lebih rentan terhadap fluktuasi alam seperti perubahan iklim, perubahan kondisi ekosistem laut, dan ketidakpastian hasil tangkapan. Ketidakstabilan lingkungan laut dapat berdampak langsung pada pendapatan nelayan dan keberlanjutan mata pencahariannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan cuaca mengakibatkan nelayan mengalami masa pengangguran yang beresiko terhadap kesejahteraan nelayan, jika nelayan tidak dapat bekerja maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya nelayan menggunakan tabungannya untuk digunakan. Nelayan mengalami kesulitan untuk membeli bahan bakar keperluan melaut karena tidak memperoleh hasil tangkapan yang dapat dijual dan tidak ada dana cadangan yang bisa digunakan untuk keperluan mendadak, sehingga nelayan mengalami keterpurukan dalam jeratan kemiskinan.

4.3.2 Potensi Industri Gampong Lampulo

Adapun hasil wawancara dengan panglima laot Gampong Lampulo, yaitu Bapak HD (50 tahun), beliau mengatakan bahwa *“Selain di jual di TPI, hasil tangkapan ini di daerah Lampulo ini juga kebanyakan langsung di distribusikan ke industri-industri yang ada di Gampong untuk bisa dimanfaatkan menjadi produk seperti keumamah, ikan kayu dan ikan asin”* (wawancara, 22 Desember 2023).

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa Gampong Lampulo memiliki potensi industri yang cukup besar, baik industri kecil maupun industri menengah. Salah satu potensi industri yang paling besar di Gampong Lampulo adalah industri pengolahan hasil laut. Gampong ini memiliki akses yang mudah ke laut, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan baku ikan segar. Selain itu, masyarakat Gampong Lampulo juga memiliki keterampilan yang baik dalam mengolah ikan, seperti membuat keumamah, ikan kayu, dan ikan asin.

Gambar 4.4
Produk Industri Rumahan Lampulo



Sumber: Google (2023)

Adanya industri pengolahan hasil laut di Gampong Lampulo merupakan salah satu contoh penerapan konsep *blue economy*. Industri ini memanfaatkan sumber daya laut, yaitu ikan, secara berkelanjutan. Hal ini terlihat dari masyarakat Gampong Lampulo yang memiliki keterampilan yang baik dalam mengolah ikan tanpa merusak ekosistem laut. Industri pengolahan hasil laut di Gampong Lampulo juga dapat mendukung pencapaian tujuan SDGs *Life Below Water*. Industri ini dapat mendukung tujuan tersebut dengan cara

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri pengolahan hasil laut dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengurangi kemiskinan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks pemanfaatan sumber daya dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam ekonomi Islam, konsep pemakaian sumber daya alam secara berkelanjutan sangat dijunjung tinggi. Gampong Lampulo sebagai contoh, menunjukkan penerapan konsep blue economy yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Industri pengolahan hasil laut memanfaatkan sumber daya alam, yaitu ikan, secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem laut. Praktik ini sesuai dengan prinsip keberlanjutan dalam ekonomi Islam yang menekankan perlunya menjaga lingkungan alam sebagai amanah yang harus dijaga oleh manusia.

Selain itu, industri pengolahan hasil laut di Gampong Lampulo juga mencerminkan prinsip-prinsip distribusi keadilan dalam ekonomi Islam. Industri ini mampu menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dengan demikian, industri ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga sosial bagi masyarakat setempat, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui industri tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam

pencapaian SDGs *Life Below Water*, yang mengedepankan upaya untuk memastikan keberlangsungan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

4.4 Kendala dalam Mengelola Potensi Desa Pesisir Menggunakan Konsep *Blue Economy* Untuk Mewujudkan Tujuan SDGs *Life Below Water* Gampong Lampulo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Z (nelayan, 50 tahun) mengatakan bahwa *“Sejauh ini kendala kami ya cuma sama keadaan alam aja, kalo misal lagi cuaca buruk kami gabisa melaut, tapi ada dimusim tertentu ikannya juga jadi terlalu banyak, karna sangking banyaknya ikan jadinya harganya jadi jatuh, yang harusnya bisa terjual Rp 15.000 cuma bisa dijual Rp 5.000 jadinya kami rugi”* (wawancara, 7 Desember 2023). Didukung oleh pernyataan dari Bapak Y (nelayan, 58 tahun) yang mengatakan bahwa *“Hidup kami itu bergantung sama laut, kalo cuaca lagi gak bagus kami gak bisa melaut, kalo gak bisa melaut kami tidak punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup kami”* (wawancara, 7 Desember 2023). Bapak HD (Panglima Laot, 50 tahun), mengatakan bahwa *“biasanya kalo ikannya terlalu banyak kan gahabis dijual ke masyarakat jadi solusinya dikirim ke Medan untuk digiling dan dijadikan pakan ikan”* (wawancara, 7 Desember 2023).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sering muncul kendala kelebihan pasokan ikan yang seringkali mengakibatkan penurunan harga di pasar lokal karena ketersediaan ikan yang berlimpah, sehingga para nelayan dan pedagang ikan

menghadapi kerugian ekonomi. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah kelebihan pasokan ikan di desa pesisir adalah dengan menerapkan konsep *Blue Economy*. Dalam hal ini, dilakukan pengiriman ikan ke wilayah lain seperti Medan untuk dijadikan pakan ikan merupakan solusi yang dapat dilakukan. Dengan melakukan pengolahan terhadap ikan yang berlebihan tersebut, limbah ikan yang sebelumnya mungkin terbuang dapat dimanfaatkan kembali sebagai pakan untuk mendukung pertumbuhan ikan yang lain, sehingga meminimalkan pemborosan sumber daya alam.

Langkah ini sejalan dengan konsep ekonomi berkelanjutan yang memanfaatkan sumber daya secara efisien serta menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dengan demikian, penerapan konsep *blue economy* tidak hanya membantu mengelola kelebihan pasokan ikan, tetapi juga mendukung upaya mencapai tujuan SDGs *Life Below Water* yang berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di wilayah pesisir. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lukum et al., (2023). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan perubahan musim maka pendapatan nelayan dikatakan meningkat namun juga sering mengalami penurunan. Perubahan musim sejatinya tidak selamanya menjadi penghalang untuk bagaimana nelayan dapat meningkatkan pendapatannya, sebab apabila musim telah memasuki musim kemarau tentu nelayan akan lebih mudah untuk mencari ikan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Namun sebaliknya jika sudah

masuk musim penghujan maka nelayan belum bisa melaut karena gelombang laut akan naik diakibatkan hujan yang lebat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan D (nelayan, 35 tahun) mengatakan bahwa *“Kendala lain yaa, diharga BBM yang cukup berat bagi kami harga BBM sekarang mahal, tapi mau tidak mau kami juga harus beli juga, kalo gak beli gakbisa melaut”* (wawancara, 7 Desember 2023). Didukung oleh pernyataan dari Bapak HD (Panglima Laot, 50 tahun) yang mengatakan bahwa *“Selain cuaca nelayan juga terkendala sama BBM yang cukup mahal, namun sejauh ini sudah ada solusi dari pemerintah dengan memberikan subsidi BBM untuk nelayan-nelayan kecil”* (wawancara, 7 Desember 2023).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa nelayan tetap harus melaut walaupun dengan keadaan BBM yang mahal. Secara umum biaya yang dikeluarkan pada tiap tiap kapal yang melaut juga cenderung berbeda, tergantung pada ukuran kapal, jarak tangkapan ikan dan jumlah hari yang digunakan untuk melaut. Semakin jauh jarak yang ditempuh maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan, terutama untuk penggunaan BBM solar. Ditambah lagi dengan kondisi musim yang tidak menentu juga mempengaruhi hasil tangkapan nelayan, karena harus mengurangi hari melaut menyesuaikan kondisi cuaca, yang mana hal ini juga akan mempengaruhi pendapatan dari nelayan itu sendiri.

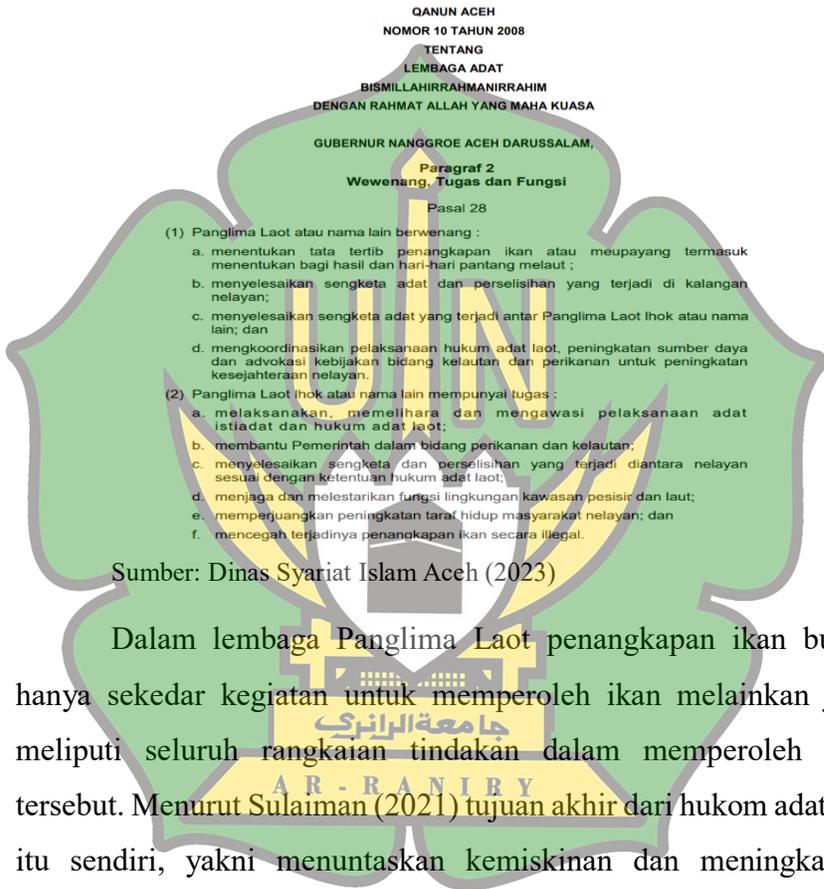
4.5 Upaya dan Solusi Pemerintah dalam Mendukung Keberhasilan Penerapan Konsep *Blue Economy* Untuk Mewujudkan Tujuan SDGs *Life Below Water* Gampong Lampulo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak D (nelayan, 35 tahun) mengatakan bahwa “*Kami kalo untuk masalah laut kami punya panglima laot, nanti semua kegiatan laut harus lewat arahan dari beliau dulu selaku pimpinan*” (wawancara, 7 Desember 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh informan didapati bahwa belum ada koordinasi secara langsung dari pemerintah pada nelayan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam mendukung keberhasilan tujuan *Sustainable Development Goals Life Below Water* pemerintah tidak melakukan koordinasi secara langsung pada nelayan, namun dalam hal ini pemerintah memberikan wewenang kepada Panglima Laot, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk bisa mengkoordinir para nelayan secara keseluruhan. Menurut Pranita et al., (2021) Panglima Laot berwenang untuk menjaga wilayah pesisir dan kelautan. Kelembagaan Panglima Laot di Aceh menempatkan Panglima Laot sebagai pemimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam menangkap ikan, mengatur wilayah penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa.

Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Aceh secara khusus mengatur tentang wewenang dan tugas dari Panglima Laot.

Pemerintah Aceh ikut berkontribusi dengan Panglima Laot dalam proses menjalankan tugas dan fungsi yang sudah di amanahkan.

Gambar 4. 5 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat



Sumber: Dinas Syariat Islam Aceh (2023)

Dalam lembaga Panglima Laot penangkapan ikan bukan hanya sekedar kegiatan untuk memperoleh ikan melainkan juga meliputi seluruh rangkaian tindakan dalam memperoleh ikan tersebut. Menurut Sulaiman (2021) tujuan akhir dari hukom adat laot itu sendiri, yakni menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Pengolahan perikanan berbasis hukom adat laot, dalam kaitannya dengan tujuan keberlanjutan lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, hal ini menjadi salah satu upaya dari pemerintahan untuk melesta rikan sumberdaya ikan dengan menggunakan kerangka kearifan lokal sebagai media

menjaga dan terjaminnya mata pencaharian masyarakat sepanjang masa.

Gambar 4.6 Panglima Laot Lembaga Yang Mengatur Adat Melaut



Sumber: Google (2023)

Hukum adat laot melarang segala jenis alat yang bisa merusak lingkungan, seperti pemboman, peracunan, pembiusan, penyetruman, dan sebagainya. Selain itu hukum adat laot juga melarang pengambilan berbagai hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Konsep aturan yang digunakan oleh Panglima Laot umumnya memiliki tiga dimensi yang terkait dengan konsep perikanan berkelanjutan, yakni ekologi, sosial, dan ekonomi. Dikutip dalam Lembaga Hukum Adat Laot (2018), dalam konsep masyarakat lokal, ekologi dan sosial yang lebih didahulukan ketimbang ekonomi. Dalam konsep tersebut, ketiga dimensi ini harus dijalankan secara beriringan dan disatupadukan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Pertama, perikan dikatakan berkelanjutan dari sisi ekonomi apabila sektor tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya secara finansial, dapat menghasilkan ikan secara berkelanjutan diartikan dapat memenuhi

kebutuhan ikan untuk generasi sekarang dan masa depan, serta mampu menyumbangkan pajak dan devisa bagi negara secara signifikan. Kedua, secara sosial, perikanan berkelanjutan dikatakan berjalan apabila kebutuhan utama sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan seluruh masyarakat terpenuhi dan menghindari konflik sosial. Industri perikanan juga menjadi lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja sehingga terjadi distribusi pendapatan yang lebih merata dan pekerjaan sebagai usaha dalam kesetaraan gender. Ketiga, pembangunan perikanan dikatakan berkelanjutan dari sisi lingkungan yang dimaksud adalah tidak adanya eksploitasi yang melewati batas, pemeliharaan stok ikan secara stabil, dan pengelolaan limbah agar tidak memberikan dampak lingkungan tercemar.

Panglima Laot Lampulo, juga menerapkan kebijakan dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan dengan melakukan pembatasan hari melaut. Hari pantang melaut bermanfaat bagi kelestarian laut dan masyarakat nelayan. Dari sisi kelestarian laut, hari pantang melaut memberikan kesempatan bagi ikan untuk berkembang biak. Dalam setahun, hari pantang melaut bisa mencapai dua bulan, termasuk hari libur karena cuaca buruk. Bagi sebagian nelayan hari libur juga di dimanfaatkan untuk memperbaiki jaring, jala pukat dan perahunya, sehingga kondisi alat-alat tangkapnya sudah bagus ketika turun kelaut.

Penelitian yang dilakukan oleh Devy & Rahmi (2019) menyatakan bahwa panglima laot berperan penting dalam bidang

kelautan dan perikanan, seperti melaksanakan hukum adat laot dan kebiasaan dalam masyarakat nelayan, dikarenakan maraknya pengrusakan alam laut yang terus terjadi seperti pengeboman dan pembiusan ikan tanpa memperdulikan kelestarian alam laut yang mengakibatkan rusak dan hancurnya terumbu karang beserta ekosistem alam laut lainnya.

Selain aturan hukum adat laot DKP Aceh juga terus meningkatkan pengawasan sumber daya laut dari kerusakan akibat penangkapan ikan dengan menggunakan alat dilarang seperti kompressor, pukot trawal dan pukot harimau.

Gambar 4.7
Pemusnahan Alat Tangkap



Sumber: Google (2023)

Berdasarkan gambar 4.7 dapat dilihat bahwa DKP Aceh terus melakukan pemantauan dan operasi sumber daya kelautan dan perikanan, mulai dari penindakan hingga pendataan. Berdasarkan peraturan Dirjen No 8 Tahun 2020, penanganan barang hasil pengawasan sumber daya perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan maka dimusnahkan. Selain

memusnahkan, pihak DKP juga menyerahkan beberapa alat tangkap berupa kompresor dan jaring trawl untuk dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan sebagai media pembelajaran untuk pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya di wilayah Aceh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al. (2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jaring trawl sebagai alat tangkap ikan terbukti dapat merusak ekosistem dilaut serta mengancam akan terjadinya kelangkaan ikan. Karena alat tangkap trawl ini bersifat aktif dimana alat tangkap ditarik oleh kapal bergerak mengejar gerombolan ikan agar masuk kedalam jaring dengan mulut jaring yang terbuka lebar selama ditarik. Menangkap sebanyak-banyaknya ikan dapat digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing* karena hanya menguntungkan nelayan saja tapi merusak ekosistem laut.

Bapak HD (Panglima Laot, 50 tahun) yang mengatakan bahwa “..... *namun sejauh ini sudah ada solusi dari pemerintah dengan memberikan subsidi BBM untuk nelayan-nelayan kecil*” (wawancara, 7 Desember 2023). Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwasanya pemerintah menjawab kendala yang ada pada nelayan, DKP Aceh mengupayakan pemberian subsidi BBM untuk para nelayan kecil dengan boat kapasitas dibawah 30 GT. Subsidi BBM ini sangat berdampak pada peningkatan keuntungan nelayan, karena dapat meringankan biaya operasional yang ditanggung. Selain itu, subsidi BBM juga dapat mendorong nelayan untuk menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan. Hal ini

karena nelayan memiliki lebih banyak keuntungan untuk berinvestasi dalam teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan.

Gambar 4.8 Kebijakan Subsidi BBM Untuk Nelayan



Sumber: Google (2023)

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Safarina (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian subsidi BBM sangat berpengaruh pada keuntungan yang didapat oleh nelayan. Karena dengan adanya subsidi BBM dapat meringankan biaya operasional yang dikeluarkan oleh nelayan dan hal ini akan berdampak pada peningkatan keuntungan yang didapat nelayan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gampong Lampulo memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar. Potensi tersebut terbagi menjadi potensi dalam sektor perikanan, dan juga industri. Potensi tersebut dapat memberikan sumber penghasilan yang stabil bagi warga desa dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pendapatan yang stabil dari sektor-sektor tersebut memungkinkan peningkatan daya beli masyarakat desa pesisir, memperbaiki akses terhadap kebutuhan sehari-hari yang akan mendukung kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Secara umum, potensi desa pesisir memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan SDGs *Life Below Water*. Dalam keseluruhan, praktik pengolahan potensi perikanan dan kelautan di Gampong Lampulo tidak hanya mencerminkan konsep *blue economy* dan keberlanjutan, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.
2. Nelayan di Gampong Lampulo mengalami kendala dalam mengelola potensi yang ada dikarenakan keadaan alam yang tidak menentu, seperti cuaca buruk dan musim yang tidak

menentu, yang mana hal ini akan mengganggu aktivitas penangkapan ikan dan mempengaruhi hasil tangkapan ikan. Selain itu nelayan juga terkendala pada harga BBM yang mahal, yang mana hal ini dapat meningkatkan biaya operasional nelayan dan menurunkan keuntungan nelayan.

3. Pemerintah Aceh menggunakan kearifan lokal sebagai dasar pengelolaan sumber daya laut, dengan memberikan wewenang kepada Panglima Laot. Upaya-upaya yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip *blue economy*, yaitu upaya untuk menjaga kelestarian laut dengan melarang penggunaan alat tangkap yang merusak dan meningkatkan pengawasan sumber daya laut. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan memberikan subsidi BBM dan mendukung pengembangan usaha perikanan ramah lingkungan. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat mewujudkan tujuan SDGs *Life Below Water*, yaitu melindungi dan memulihkan ekosistem laut dan pesisir, serta menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian. Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk membahas lebih mendalam mengenai Lembaga Hukum Adat Laot yang berhubungan dengan konsep *blue economy*.
2. Untuk nelayan diharapkan lebih memerhatikan penggunaan alat-alat tangkap yang digunakan dan menghindari kegiatan *illegal fishing*, sehingga hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak berkepanjangan bagi lingkungan.
3. Untuk pemerintah diharapkan untuk mengawal mekanisme pendistribusian BBM, mengingat BBM bersubsidi ini dinilai penting bagi para nelayan kecil agar dapat diperoleh secara tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiprayoga, S., & Samiaji, J. (2021). Opportunities and Strategies for the Blue Economy through the Empowerment of Sumatera Coastal Communities in Supporting the Realization of the National Food Security. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 934(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/934/1/012039>
- Ainurrohmah, D. (2022). *3 Klasifikasi Desa Berdasarkan Mata Pencapaian Beserta Contohnya*. <https://dosengeografi.com/desa-berdasarkan-mata-pencapaian/>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016*. Diakses pada http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_22_tahun_2016
- Bappenas. (2023). *Apa Itu SDGs?* SDGs Bappenas. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Center Universitas Brawijaya. (2023). *Sustainable Development Goals*. <https://sdgs.ub.ac.id/sdgs-center-ub/>
- Daulay, S. R. (2022). Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep Blue Economy Dalam Mewujudkan Sdgs Desa (Studi Kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat). *Skripsi UMSU*.
- Dermawan, A. (2019). *KKP Terus Kembangkan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Terluar Sebagai Kedaulatan Bangsa*. Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Diakses pada 11 November 2023 dari <https://kkp.go.id/djprl/artikel/10236-kkp-terus-kembangkan-pengelolaan-pulau-pulau-kecil-dan-terluar-sebagai-kedaulatan-bangsa>
- Devy, S., & Rahmi, S. (2019). Peran Panglima Laot Dalam

- Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Pulo Aceh. *Jurnal LEGITIMASI*, 8(1), 103–119.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh. (2020). *Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2020 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*.
- Dinas Syariat Islam Aceh. (2023). *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*. 1–21.
- Firdaus, S. (2022). Al-Qur'an Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Untuk Pencapaian Sdgs. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 120.
- Gampong Lampulo. (2020). *Rencana Pembangunan Gampong Lampulo Tahun 2021-2027*.
- Ghalizda, N. M. B. (2020). Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 27–31.
- Hastuti, A., Anam, C., & Dkk. (2022). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022*. 29.
- Humaida, N., Aula Sa'adah, M., Huriyah, H., & Hasanatun Nida, N. (2020). Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131.
- Indara, S. R., Bempah, I., & Boekoesoe, Y. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Tangkap Di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. *Agrinesia*, 2, 92–97. <https://doi.org/10.37046/agr.v2i1.2443>
- Irhamisyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, 38, 45–54.
- Jayakusuma, Z., Maya, L. M., & Rasudin, N. (2023). Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai yang Berpotensi Blue Economy

- dalam Rangka Pencapaian Sustainable Development Goals di Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis. *Riau Law Jurnal*, 7(1), 114–134.
- Junef, M. (2019). Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 303.
- Kementerian PPN. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). *Kementerian PPN*.
- Lembaga Hukum Adat Laot. (2018). *Panglima Laot, Lembaga Yang Mengatur Adat Melaut di Aceh*. Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses pada 8 Desember 2023 <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh/panglima-laot-lembaga-yang-mengatur-adat-melaut-di-aceh/>
- Lukum, R., Hafid, R., & Mahmud, M. (2023). Pengaruh Perubahan Musim Terhadap Pendapatan Nelayan. *Journal of Economic and Business Education*, 1(1), 115–123.
- Mahardianingtyas, S., Adhetiya Safitra, D., & Agustio, A. (2019). *A Blue Economy for Better Economic Development: A Case Study of East Nusa Tenggara, Indonesia*. 89(Apbec 2018), 165–173.
- Mawardati, J. (2019). Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap pada Kawasan Minapolitan. *Jurnal-Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(2), 336–347.
- Moha, I., Sondakh, S. J., & Kotambunan, O. V. (2019). Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Di Desa Bulawan Induk Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mogondow Timur. *Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 7(1), 1067.
- Nawawi, M. N. (2018). *Desa Pesisir Mandiri, Implementasi Strategi dan Aksi*. Kompasiana. Diakses pada 7 Oktober 2023 dari <https://www.kompasiana.com/nawawimnoer/5aaedaa4cbe523>

4fa326b772/desa-pesisir-mandiri-implementasi-strategi-dan-aksi?page=all

Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(3), 1–11.

Pelabuhan Perikanan Lampulo. (2023). Kementerian Kelautan Dan Perikanan. https://pipp.kkp.go.id/Ct_menu/profildetail/iNMxrCURXaPy

Pranita, A. M., Savitri, E. I., Said, B. D., & Yulianto, B. A. (2021). Peran Panglima Laot Dalam Upaya Mewujudkan Ecological Security Di Aceh. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 131–138.

Profil Gampong Lampulo. (2021). <https://desalampulo.com/data-penduduk/>

Ramadina, S. A. (2021). *Konsep Sustainable Development Goals Dalam Perspektif Islam*. Alfatih Media. Diakses pada 25 Oktober 2023 dari <http://alfatih-media.com/konsep-sustainable-development-dalam-perspektif-islam.html>

Rusydy, N., & Mansur, U. (2021). Implementasi Konsep Blue Economy Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Di Masa New Normal. *Senakota*, 1(1), 75–82.

Safarina. (2021). *Pengaruh BBM Solar Bersubsidi Terhadap Keuntungan Nelayan Kecil Di Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh*. Universitas Syiah Kuala.

Sambodo, L. A. A. T., Putri Pane, D. D., Pertamawati, L. H., Maftukhah, S., Firdaus, I. T., Wikapuspita, T., Harianto, S. K., Nurrahmani, S. M., Nugrahaeni, T. A., Mukhairiq, M. T., Alfarisy, M. A. R., Manullang, R. A. M., Riyanto, R., Artika, K., Nurhaditia, F., & Tamadhika, R. (2023). *Indonesia Blue Economy Roadmap*. Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency.

- Sarifudin, A. (2015). Analisis Penerapan Konsep Sustainable Development Goals Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Setyawati, L. R., Hadistian, Cahya, D. D., Marsetio, Novarianti, A. D., & Said, B. D. (2021). Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Kota Sabang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 178–185.
- Siregar, E. S., Kusumo, R., Ardianti, E., Akbar, R., & Nasution, A. S. (2023). Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl. *Jurnal Keadilan*, 3(2), 77–89.
- Sitorus, H. W. (2018). Analisis Konsep Blue Economy Pada Sektor Kelautan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. *JOM Fakultas Hukum*, 5(2).
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *Buku Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman. (2021). Model Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot di Lhok Rigaih Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 40(1), 18–24.
- Ulfa, M. (2018). Persepsi Masyarakat Nelayan dalam Menghadapi Perubahan Iklim (Ditinjau dalam Aspek Sosial Ekonomi). *Jurnal Pendidikan Geografi*, 23(1), 41–49. <https://doi.org/10.17977/um017v23i12018p041>
- Wahyuddin, Y. ., Hidayat, R. M., & Verdiansyah, T. R. (2022). Strategi Kebijakan Blue Economy Indonesia Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Pada Era Joko Widodo. *Sriwijaya Journal of International Relations*, 2(2), 70–87.

PANDUAN WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Lama Melaut :

Pertanyaan :

1. Menurut anda bagaimana potensi sumber daya laut yang ada di Gampong Lampulo dalam membantu perkembangan desa?
2. Menurut anda apakah pemanfaatan sumber daya laut yang ada di Gampong Lampulo dapat memberikan manfaat bagi nelayan?
3. Bagaimana para nelayan di Gampong Lampulo bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya alam laut dengan lebih baik?
4. Adakah kerja sama atau program dari pemerintah setempat yang melibatkan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendukung pembangunan desa?
5. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh nelayan dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut? Jika ada, bagaimana pemerintah desa membantu nelayan dalam mengatasi kendala ini?

DOKUMENTASI PENELITIAN





SURAT IZIN PENELITIAN

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 875

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 3248/Un.08/FEBI I/TL.00/12/2023 Tanggal 4 Desember 2023 tentang Permohonan Rekomendasi izin Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Faiza Humairah
- Alamat : Jl. Lingkar Kampus Uin Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Analisis Potensi Desa Pesisir Berbasis Blue Economy Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Analisis Potensi Desa Pesisir Berbasis Blue Economy Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : -Kantor Camat Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Kantor Geuchik Lampulo Kota Banda Aceh
-Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh
- Waktu Penelitian : 2 (Dua) Bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Dr. Fithriady, Lc., M.A (Wakil Dekan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 6 Desember 2023

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,
Sekretaris,


Ir. Yustanidar
Pembina Tk. I/NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Perteinggal.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Faiza Humairah
NIM : 200602017
Tempat/ Tgl. Lahir : Bireuen/14 September 2002
Alamat : Juli Meunasah Tambo
No. Hp : 085219435002
Email : 200602017@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SD : Lulus Tahun 2014
2. SMP : Lulus Tahun 2017
3. SMA : Lulus Tahun 2020
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Fakri S.Pd., SD
Pekerjaan : PNS ANIRY
Nama Ibu : Nilawati
Pekerjaan : IRT
Alamat Orang tua : Juli Meunasah Tambo